

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM
PENANGGAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ADE SUPRIALDI

NPM : 177110436

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ade Suprialdi
Npm : 177110436
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Penelitian : Implementasi Strategi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Turut Menyetujui

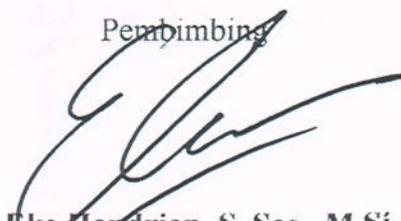
Program Studi Administrasi Publik

Ketua



Lilis Suriani S.Sos., M.Si

Pembimbing



Eko Handrian, S. Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ade Suprialdi
NPM : 177110436
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Strategi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan.

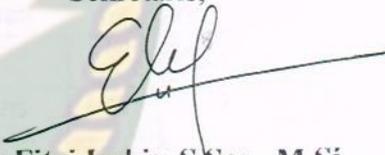
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh Karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Ketua,


Eko Handrian, S.Sos., M.Si.

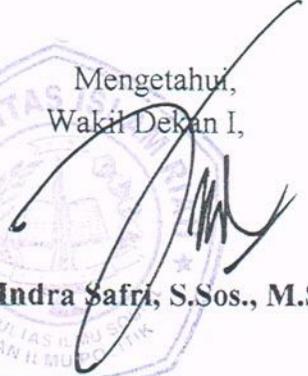
Sekretaris,


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Anggota,


Heyman, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si



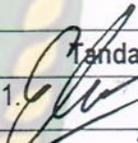
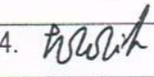
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

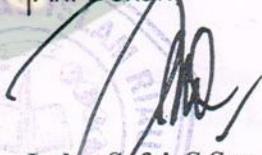
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1220/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 18 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Agustus 2021 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ade Suprialdi
NPM : 177110436
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Nilai Ujian : Angka : "82.26" ; Huruf : "A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Herman, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Loliita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Agustus 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ade Suprialdi
NPM : 177110436
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Strategi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Ketua,

Sekretaris,


Eko Handrian, S.Sos., M.Si.

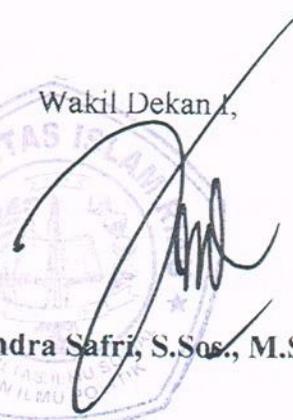

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kepada ALLAH SWT, karena dengan Rahmatnya-Nya yang telah melimpahkan karunia, hidayah, inayah, kesehatan dan keimanan islam kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul “Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan”.

Kemudian Shalawat dan salam selalu kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allhumma sholli'ala saidina Muhammad Wa'ala ali tsayyida Muhammad, Assalammu'alaika Ya rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan selama proses penyusunan Proposal. Penulis mengucapkan terimakasih yang kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

3. Ibu Lilis Suriani S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau
4. Bapak Eko Handrian S.Sos.,M. Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik dan selaku pembimbing saya yang banyak memberikan waktu dan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang telah di arahkan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan Ibuk para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mencari ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam segala urusan Administrasi.
7. Kepada Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta Staff yang telah membantu penulis dalam memberikan data atau informasi dalam skripsi ini.
8. Terkhusus dan teristimewa ucapa terimakasih yang tiadda hingga penulis persembahkan kepada Kelu Kedua Orang Tua saya ayahanda Safwan, ibunda Munawarah dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang telah memberikan semangat dan selalu senantiasa mendoakan saya, memberikan inspirasi serta bantuan untuk penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Administrasi Publik yang banyak meluangkan waktu serta membantu saya dalam berkembang memahami ilmu-ilmu yang dipelajari sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang diberikan kepada semua pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga ALLAH SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Penulis
Ttd.

Ade Suprialdi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Administrasi.....	17
2. Konsep New Publik Service.....	20
3. Konsep Organisasi.....	23
4. Konsep Manajemen.....	25
5. Konsep Manajemen Strategis.....	28
6. Konsep Implementasi Strategi.....	41
1. Sistem pelaksanaan.....	42
2. Sistem Pemantauan.....	43
3. Sistem Pengawasan.....	44
B. Kerangka Pikir.....	46
C. Konsep Operasional.....	48
D. Operasional Variabel.....	50
E. Teknik Pengukuran.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian.....	55

B. Lokasi Penelitian	55
C. Populasi dan sampel	56
1. Populasi	56
2. Sampel	56
D. Teknik Penarikan Sampel	57
E. Jenis dan Sumber Data	58
1. Data Primer	58
2. Data Sekunder	58
F. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Kuesioner	59
2. Wawancara	60
3. Observasi	60
4. Dokumentasi	61
G. Teknik Analisis Data	62
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	63
1. Penduduk	64
1. Mata pencarian	64
B. Gambaran Umum (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti	65
1. Tugas pokok	65
2. Fungsi	66
3. Visi misi BPBD	66
C. Struktur BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti	67
BAB V HASIL PENELITIAN	69
A. Identitas Responden	69
1. Jenis Kelamin	69
2. Usia	70
3. Tingkat Pendidikan	71
B. Hasil dan pembahasan data indikator dari	73
1. Sistem Pelaksanaan	73
2. Pemantauan	79
3. Pengawasan	84
C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator	89
D. Hambatan Dalam Implementasi Strategi BPBD	93

BAB VI PENTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Jumlah Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau 4
I.2	Jumlah Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Kepulauan Meranti ... 5
I.3	Nama-Nama Kecamatan Tebing Tinggi Timur 6
I.4	Titik Hotspot Kabupaten Kepulauan Meranti 7
I.5	Strategi Dan Arah Kebijakan Bpbd 8
I.6	Mekanisme Dan Prosedur Pemadam Kebakaran Hutan Lahan Dan Kecelakaan Bpbd Kabupaten Kepulauan Meranti 10
II.1	Operasional Variabel 50
III.1	Populasi Dan Sampel Penelitian 57
III.2	Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Mengenai Implementasi Strategi Bpbd Kabupaten Kepulauan Meranti 63
IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2020 67
V.1	Identitas Jumlah Responden Pegawai Dan Honorer Dinas Bpbd Kabupaten Kepulauan Meranti 72
V.2	Identitas Jumlah Responden Masyarakat Peduli Api (Mpa) Kabupaten Kepulauan Meranti..... 73
V.3	Identitas Jumlah Responden Pegawai Dan Honorer Dinas Bpbd Berdasarkan Usia 74
V.4	Identitas Jumlah Responden Masyarakat Peduli Api (Mpa) Berdasarkan Usia 74
V.5	Identitas Jumlah Responden Pegawai Dan Honorer Dinas Bpbd Berdasarkan Tingkat Pendidikan 75
V.6	Identitas Jumlah Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Berdasarkan Tingkat Pendidikan 76
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer Bpbd Kabupaten Kepulauan Meranti Megenai Indikator Pelaksanaan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan 77

V.8	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (Mpa) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pelaksanaan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	81
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer Bpbd Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pemantauan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	84
V.10	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (Mpa) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pemantauan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	87
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer Bpbd Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	89
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (Mpa) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	95
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer Bpbd Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	96
V.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (Mpa) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Peta Rawan kebakaran hutan dan lahan kabupaten Kepulauan Meranti.....	5
II.1 Tahapan-Tahapan Dalam Manajemen Strategi.....	31
11.2 Kerangka Pikir Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	47
V.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten Kepulauan Meranti	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Untuk Pegawai Dan Honorer BPBD Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	100
2. Daftar Kuesioner Untuk Masyarakat Peduli Api(MPA) Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	105
3. Hasil Rekapitulasi Jawaban Reponden Pegawai Dan Honorer BPBD Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	110
4. Hasil Rekapitulasi Jawaban Reponden Masyarakat Peduli Api (MPA) Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	111
5. Daftar Wawancara Untuk Kepala BPBD Dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	112
6. Surat Keputusan Dekan Fisipl Univeraitas Islam Riau Tentang penetapan Dosen Pembimbing.....	116
7. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	117
8. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU).....	118
9. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Merati (DPMPTSP KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)	119
10. Surat Izin Kegiatan Riset Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	120
11. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	121

12. Dokumentasi Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	122
13. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Kepada Pegawai dan Honorer BPBD Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	123
14. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) Tentang Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	124



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Suprialdi
NPM : 177110436
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Atas naskah yang saya daftarkan pada Ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 diatas maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Konferensif yang saya telah ikut serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021


Pernyataan
Ade Suprialdi

IMPLEMENTASI STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENANGGAMAN KEBAARAN HUTAN DAN LAHAN

ABSTRAK

Ade Suprialdi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Teknik pengukuran yang digunakan adalah skala likert yaitu memberikan skor nilai untuk setiap kategori. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kuantitatif. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Pegawai Dan Honorer BPBD, Dan Masyarakat Peduli Api (MPA), selanjutnya teknik penarikan sampel untuk kepala dinas BPBD dan kepala bidang pemadam kebakaran dilakukan teknik sensus, untuk pegawai dan honorer BPBD menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan untuk masyarakat peduli api (MPA) menggunakan teknik accidental sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi dari pegawai dan honorer BPBD dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sedangkan data sekunder berupa buku-buku, dokumentasi, renstra BPBD, data jumlah titik api di Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan berada pada Cukup Terlaksana. hal ini disebabkan bahwa anggaran yang kurang memadai dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dan kurangnya kepelatihan bagi pegawai dan honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci : Implementasi Strategi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF THE REGIONAL DISASTER
MANAGEMENT AGENCY OF MERANTI ISLAND REGENCY IN FOREST
AND LAND FIRE MANAGEMENT**

ABSTRACT

Ade Suprialdi

This research was conducted with the aim of knowing the Implementation of the Strategy of the Regional Disaster Management Agency of Meranti Islands Regency in Handling Forest and Land Fires. This research was conducted by using indicators of implementation, monitoring and supervision. The measurement technique used is the Likert scale, which gives a score for each category. This type of research uses descriptive quantitative methods. The population and samples in this study were the Head of the Regional Disaster Management Agency of Meranti Islands Regency, the Head of the Fire Department, BPBD Employees and Honorary Officers, and the Fire Care Community (MPA), then the sampling technique for the head of the BPBD service and the head of the fire department was carried out. census technique, for employees and honorary BPBD using purposive sampling technique, while for people concerned about fire (MPA) using accidental sampling technique. The types and sources of data used are primary data obtained directly from interviews and observations from BPBD employees and honorariums and the Fire Care Community (MPA) while secondary data in the form of books, documentation, BPBD strategic plan, data on the number of hotspots in Meranti Islands Regency . Data collection techniques used consisted of questionnaires, interviews, observation and documentation. Based on the results of research that has been carried out by researchers regarding the Strategy Implementation of the Regional Disaster Management Agency of Meranti Islands Regency in Handling Forest and Land Fires, it is in Sufficiently Implemented. This is due to the inadequate budget in handling forest and land fires and the lack of training for employees and honorary staff of the Regional Disaster Management Agency of Meranti Islands Regency.

Keywords : *Strategy Implementation, Regional Disaster Management Agency*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi adalah usaha yang dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rencana/program kerja organisasi yang telah ditentukan. Implementasi juga merupakan pekerjaan yang telah ditetapkan setelah merumuskan strategi. Implementasi strategi juga merupakan jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pengembangan program, anggaran dan prosedur. Implementasi strategi juga cerminan dari perumusan strategi, maka dari itu implementasi strategi sangat penting dalam organisasi.

Implementasi juga sebuah penilaian yang dibutuhkan dalam rangka mengukur mencapai keberhasilan dari proses pelaksanaan yang dilakukan tersebut, penilaian program (evaluasi) merupakan indikator penting dalam pelaksanaan, sehingga dengan adanya penilaian ini dari segala kerja yang telah dilakukan dapat diukur dari penilaian tersebut. Implementasi adalah satu cara atau aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, karena merupakan faktor penting dalam mewujudkan kegiatan organisasi. Dengan adanya pelaksanaan berarti bisa mengetahui apakah aktivitas yang dijalankan ini sesuai yang telah direncanakan, dan cara mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk strategi. Maka dari itu sangat pentingnya implementasi ini dalam organisasi untuk menentukan

program atau kegiatan yang telah dirumuskan ini berjalan dengan baik atau tidaknya.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk gangguan yang masih sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, merusaknya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produksi tanah. Asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan mengganggu kesehatan masyarakat serta transportasi darat, laut maupun udara. Masalah ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di Provinsi Riau, namun juga berdampak pada negara tetangga yang letak geografisnya berdekatan dengan Provinsi Riau.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini sering terjadi baik disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun tidak kesengajaan, mulai dari sebab kesengajaan seperti pembukaan lahan dengan cara membakar lahan tersebut dan faktor tidak kesengajaan yaitu disebabkan oleh faktor cuaca yang begitu panas dimusim kemarau. Kebakaran dianggap merusak ekosistem dan dampaknya bagi keanekaragaman hayati.

Kebakaran hutan dan lahan biasanya menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Selain dampak secara umum dampak fisik kebakaran hutan lahan adalah :

1. Rusaknya ekosistem dampak kebakaran hutan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup didalam hutan.

2. Asap dari kebakaran hutan dan lahan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), Asma, penyakit paru Obstruktif Kronik, Penyakit Jantung, serta Iritasi ada mata, tenggorokkan dan hidung kita.
3. Tersebarunya Asap kebakaran Hutan dan lahan juga dapat mengganggu jarak pandang . Kabut asap juga dapat mengganggu transportasi penerbangan.
4. Tersebarunya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara. Hal ini akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim
5. Kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air saat musim hujan, hal ini dapat menyebabkan tanah menjadi longsor atau pun banjir. Kebakaran Hutan dan lahan..(2018, Agustus 25). Diakses pada november 12,2020 dari artikel ilmiah : (<https://pemilu.kompas/read/2018/0825/krbakran-hutan-dan-lahan-apa-dampak-dan-upaya-pencegahan>)

Provinsi Riau menjadi langganan tiap tahunnya terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena Riau ini sebagian besar adalah hutan. Kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan sengaja oleh masyarakat ini karna ingin membuka lahan mereka dengan cara dibakar, karena tidak menghabiskan tenaga untuk membersihkan lahan tersebut. Provinsi Riau ini memiliki lahan gambut yang cukup banyak dengan kedalaman busa mencapai hingga sepuluh meter, sehingga kebakaran yang terjadi cukup susah ditangani.

Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Contoh penanganan yang dilakukan adalah dengan dibuatnya posko gabungan. Posko gabungan ini memiliki tugas, antara lain memfasilitasi upaya pengenalan tim (tim

kesehatan, tim penegak hukum, dan pemadaman) yang disinergikan dengan pemerintah kabupaten.

Tabel.1.1 Jumlah Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Riau

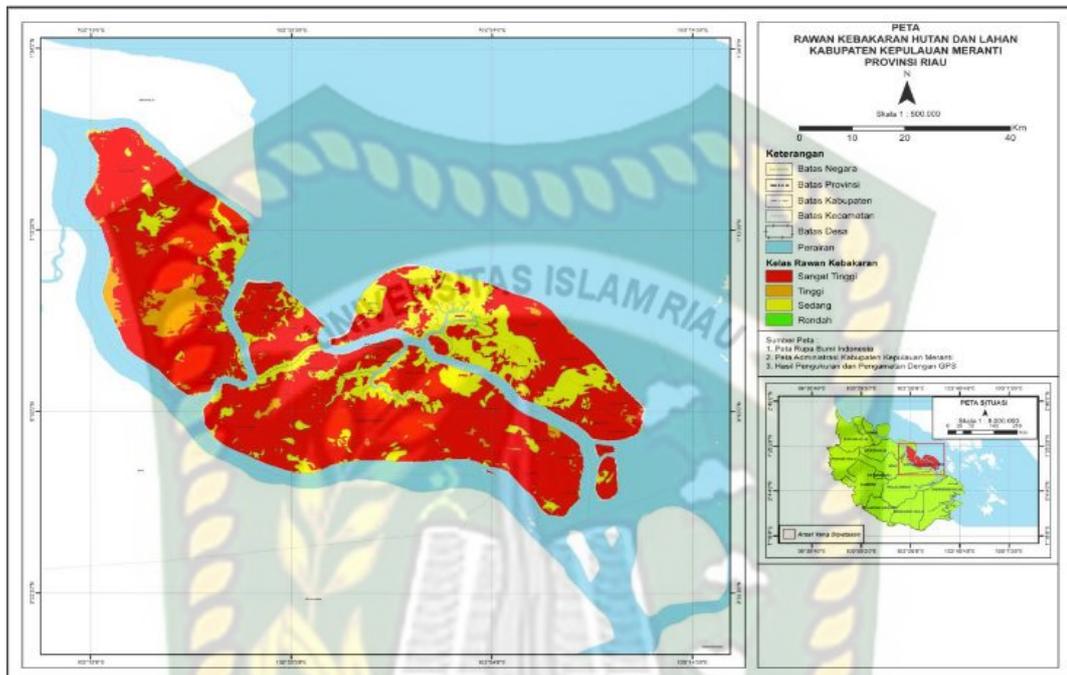
Riau	Tahun		
	2018	2019	2020
	37.236,27 ha	90.550,00 ha	15,300,00 ha

Sumber : BPBD Provinsi Riau 2021

Dari rekapitulasi diatas Provinsi Riau menjadi urutan ke 25 penyebab kebakaran hutan dan lahan terluas dari 34 Provinsi, berarti Provinsi riau ini masih besarnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu pemerintah harus segera mencari strategi untuk agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan lagi.

Salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti luas daratan 371.419 ha. Dengan luas lahan didominasi oleh lahan gambut yang tersebar diseluruh wilayah yaitu 9 kecamatan. Luas dan dan sebaran gambut berbeda-beda disetiap kecamatan. Kondisi inilah yang menyebabkan sangat mudah terjadinya kebakaran jika tidak dipertindak dan dikelola.

Gambar 1.1 Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Bisa kita lihat dari gambar diatas bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan penyumbang kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi, dan apalagi Kabupaten Kepulauan Meranti ini rawan kebakarannya, tanah gambut ini sangat kering pada saat musim kemarau dan susah dipadamkan saat kebakaran hutan dan lahan.

Tabel.1.2. Jumlah Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti	Tahun		
	2017	2018	2019
	511,069 Ha	1214,8 Ha	2435.3 Ha

Sumber:BPBD Kab. Kep.Meranti, 2021

Dasar Hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009, Kabupaten Kepulauan

Meranti Terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau rangsang, Pulau Topang, pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 Desa.

Tabel 1.3. Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa
1	2	3	4
1.	Tebing Tinggi	Selatpanjang	9
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	14
3	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	10
4	Rangsang	Tanjung Samak	14
5	Rasang Barat	Bantar	12
6	Rangsang Pesisir	Sonde	11
7	Merbau	Teluk Belitung	10
8	Pulau Merbau	Renak Dungun	11
9	Putri Puyu	Bandul	10
Jumlah			101

Sumber: Proyeksi BPS Kab.Kep.Meranti 2021

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dimana perekonomian mayoritas berasal dari perkebunan karet, perkebunan sagu dan nelayan. Sebagai tanaman yang khas sagu merupakan tanaman yang berpotensi hidup di kebun masyarakat Kepulauan Meranti. Sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti ini termasuk wilayah yang memiliki lahan gambut yang sangat banyak dan berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan.

Tabel.1.4. Titik Hotspot Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 dan 2019

No	Kecamatan	Titik Hotspot	
		2018	2019
1.	Tebing Tinggi Timur	20	26
2.	Tebing Tinggi Barat	2	55
3	Rangsang	3	65
4	Rangsang Barat		4
5	Merbau		5
Jumlah		25	155

Sumber: BPBD Kab. Kepulauan Meranti, 2021

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti baru dibentuk pada tahun 2016 silam, salah satu tujuan dibentuknya BPBD ini adalah untuk bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Dalam pandangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, upaya penanggulangan bencana daerah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan merupakan bagian wajib menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah daerah. Ini sangat keterkaitan dengan fungsi pemerintah yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk didalamnya melakukan penanggulangan bencana.

Didalam rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa terdapat visi misi BPBD untuk memberantaskan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupatn Kepulauan Meranti ini bisa dilihat ditabel 1.5. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

Tabel.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

Visi	Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat yang Madani.		
Misi	Meningkatkan Infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revalidasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. 2. Meningkatkan kehandalan dan kecepatan penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, serta kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas. 4. Mewujudkan sistem Mitigasi, penanganan penanggulangan pasca bencana yang efektif dan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana 2. Penanganan Bencana dan kebakaran yang responsif disertai dukungan logistik dan peralatan 3. Meningkatnya kinerja pelayanan penanganan pemulian pasca bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dari kepala daerah terhadap anggaran 2. Regulasi tentang penanggulangan bencana 3. Prioritas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur 4. Komitmen dari kepala daerah dalam peningkatan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat 5. Komitmen dari kepala BPBD untuk menjadikan masyarakat tangguh bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan terhadap aparatur pemerintah Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan.

Sumber: Renstra BPBD Kab.Kep.Meranti 2021

Penjelasan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Komitmen dari kepala daerah terhadap anggaran

Komitmen adalah keseriusan kepala daerah terhadap anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memberikan anggaran yang dibutuhkan oleh BPBD untuk keperluan penanganan bencana

2. Regulasi tentang penanggulangan bencana Meranti

Regulasi tentang penanggulangan bencana yaitu peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016

3. Prioritas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Memberikan pelatihan kepada aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Meranti untuk melatih kesiapan terhadap terjadinya bencana

4. Komitmen dari kepala daerah dalam peningkatan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat

Kepala daerah memberikan jaminan nyaman dan keamanan terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti

5. Komitmen dari kepala BPBD untuk menjadikan masyarakat tangguh bencana

Menjadikan masyarakat tangguh bencana adalah yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat disetiap desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti

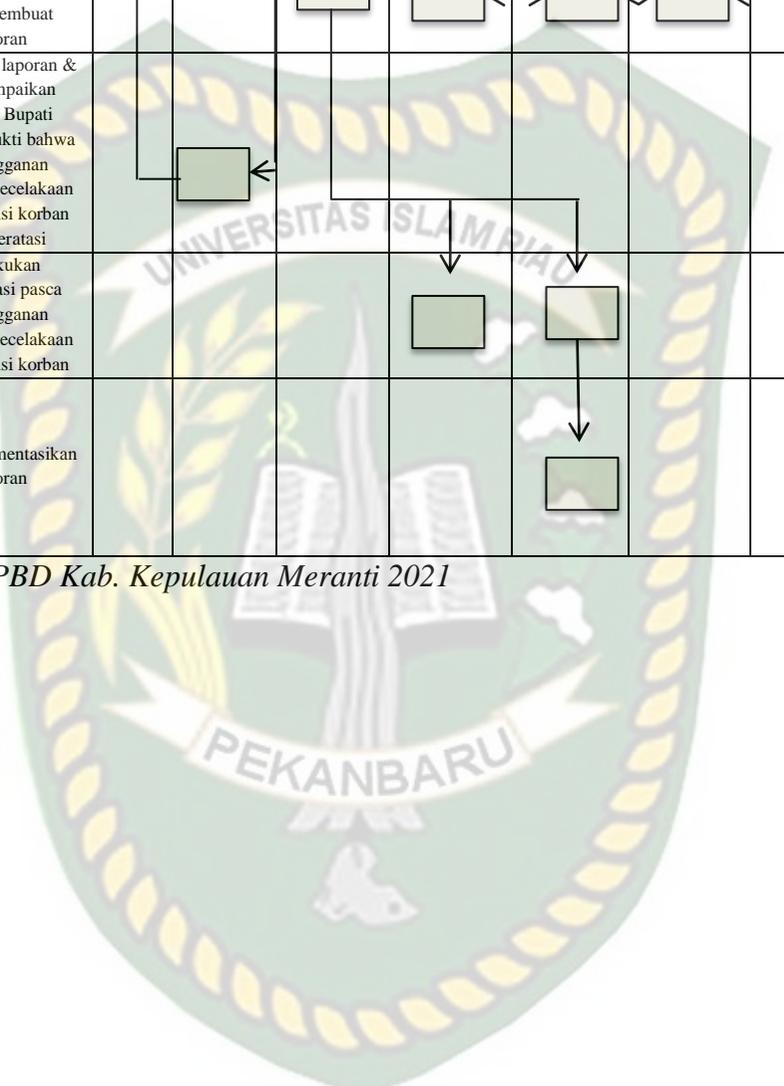
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini mempunyai alur atau mekanisme pemadaman kebakaran hutan, lahan dan kecelakaan, Mekanisme ini yang menjadi salah satu pelaksanaan saat terjadinya kebakarn hutan, lahan dan kecelakaan, bisa dilihat di tabel 1.6. Mekanisme Dan Prosedur Pemadaman Kebakaran Hutan, Lahan Dan Kecelakaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel. 1.6. Mekanisme Dan Prosedur Pemadaman Kebakaran Hutan, Lahan Dan Kecelakaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA								Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Bupati	Sekretaris Daerah (Ka. BPBD)	Kepala Pelaksanaa BPBD)	Kabid. Pemadam Kebakaran Pemukiman, Gedung, Hutan, Lahan & kecelakaan	Kasi Kebakaran Hutan, Lahan & Kecelakaan	Petugas Pemadaman Kebakaran	Petugas pos Penjagaan Pemadaman Kebakaran	Instansi Teknis Terkait				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Menerima informasi masuk & mengkonfirmasi tentang kejadian karhutla/kecelakaan									Radio HT, alat komunikasi ATK	2 Menit	Laporan Kejadian Karhutla/Kecelakaan	
2.	Menerima laporan & meneruskan informasi kejadian karhutla/kecelakaan									Laporan Kejadian karhutla/kecelakaan,alat komunikasi	3 menit	Laporan kejadian karhutla/kecelakaan	
3.	Memerintahkan untuk segera melakukan survey guna memastikan situasi dan kondisi yang terjadi									Radio HT, alat komunikasi	5 menit	Laporan kejadian karhutla/kecelakaan	
4.	Melakukan survey kelokasi terjadinya karhutla/kecelakaan & segera membuat laporan									Radio HT,alat komunikasi, kamera, kendaraan operasional lapangan, ATK	15 menit	Hail survey kejadian karhutla/kecelakaan	
5.	Mengintruksikan untuk saling berkoordinasi dalam menangani karhutla/kecelakaan & evakuasi korban									Laporan hasil survey, ATK, alat komunikasi	15 menit	Disposisi	
6.	Berkoordinasi dalam mempersiapkan peralatan &									Disposisi, ATK, kompuer, printer, alat komunikasi, konsumsi	20 menit	Peralatan&perlengkapan ang dibutuhkan siap digunakan	

	perlengkapan yang dibutuhkan												
7	Saling berkoordinasi dalam melaksanakan penanganan karhutla/kecelakaan & evakuasi korban serta membuat laporan												
8	Menerima laporan & menyampaikan kepada Bupati sebagai bukti bahwa penanganan karhutla/kecelakaan & evakuasi korban telah teratasi												
9	Melakukan investigasi pasca penanganan karhutla/kecelakaan & evakuasi korban												
10	Mendokumentasikan laporan												

Sumber: BPBD Kab. Kepulauan Meranti 2021



Rencana program dan kegiatan Penanganan kebakaran hutan dan lahan, dalam antisipasi yang perlu dilakukan BPBD dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut (renstra 2016-2021)

- a. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
- b. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- d. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan
- e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- f. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- g. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
- h. Operasional siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- i. Pengawasan hotspot dan potensi titik api kebakaran.
- j. Melaksanakan kegiatan patroli
- k. Menghimpun data informasi dalam rangka pencegahan untuk meminimalisirkan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data yang ada diatas, penulis dapat menjelaskan bahwa program yang telah direncanakan oleh pihak Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum bisa terkendalikan oleh BPBD itu sendiri, sampai saat ini kebakaran terus terjadi di setiap wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan berdasarkan fakta dilapangan dimana kawasan ini berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Berhubungan dengan permasalahan diatas dan juga didukung dengan data dilapangan dan berdasarkan Renstra faktor permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu

1. Terbatasnya Sumber daya aparatur bidang penanggulangan bencana, baik dari aspek kuantitas dan kualitas
2. Masih terbatasnya jumlah dan kuitas dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi
4. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan diatas tersebut yaitu :

- 1). Faktor internal
 - a. Keterbatasan sumber daya aparatur penanggulangan bencana
 - b. Jumlah aparatur belum memadai
 - c. Sarana dan Prasarana belum memadai
- 2). Faktor Ekternal
 - a. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
 - b. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral
 - c. Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah dipaparkan dan ditambah data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang terjadi dalam Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Fenomena ini

yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian maka dapat diketahui beberapa fenomena yang terjadi, antara lain :

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis menduga bahwa Komitmen Kepala Daerah dalam penganggaran dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai yang dianggarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih jauhnya anggaran untuk keperluan BPBD itu sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengajukan anggaran senilai Rp. 10.000.000.000 akan tetapi pemerintah Daerah hanya mengeluarkan anggaran senilai Rp. 6.996.180.000
2. Penulis menduga bahwa didalam Rencana Strategi BPBD terdapat Prioritas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur akan tetapi pelaksanaan pelatihan aparatur tidak terlaksanakan oleh BPBD itu sendiri, maka dari itu penulis bisa melihat dari bahwa belum adanya pelatihan bagi aparatur itu sendiri pada saat ini.
3. Penulis menduga Komitmen Kepala Daerah terhadap keamanan masyarakat belum terlaksana dalam menjaga rasa keamanan untuk Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, masih banyak terjadinya kebakarn hutan dan lahan masyarakat, kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di kalangan masyarakat dan tidak adanya pos penjagaan untuk keamanan kebakaran hutan dan lahan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Oleh sebab itu, berhubungan dengan permasalahan diatas dan didukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang

maksimal Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan penjelasan teori dan kasus tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan .”**

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian fakta terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti maka Penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ” ?
2. Apa saja hambatan Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis :

- a. Bagaimana Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

- b. Apa saja hambatan Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang manajemen strategis.
- b. Guna akademis, yaitu peneliti diharapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan yang ingin meneliti hak yang sama.
- c. Guna praktis, adalah peneliti ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pejabat Struktural pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Beberapa pengertian dari administrasi yang dikenal di Indonesia berasal dari kata *administrare* yaitu *ad* = pada, *ministrare* = yaitu membantu atau melayani. Dengan demikian dapat diartikan asal kata administrasi adalah memberikan sebuah pelayanan, pelaksanaan, dan bantuan kepada masyarakat. (Syamsir Syamsudin. I. 2016: 1)

Pengertian administrasi awalnya hanya memiliki beberapa pandangan atau hanya memiliki cabang itu sendiri, namun dari beberapa kemajuan perkembangan zaman, pengertian administrasi juga ikut berkembang seiring berkembangnya waktu. Baik dari memandang administrasi sebagai usaha, manajemen, proses samapai pada pemerintahan.

Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Untuk mendapatkan pemahaman administrasi dalam arti luas, ada beberapa defenisi yang diberikan oleh para ahli, diantaranya :

Sondang. P. Siagian(2015, hal, 2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang

didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Beddy Irawan Maksudi (2017, hal,31) administrasi dari aspek kepranataan adalah sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan secara resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusia yang berkelompok dalam suatu organisasi yang dinamakan lembaga.

Dari keseluruhan pendekatan administrasi ini merupakan implementasi dari kerja sama antar dua orang atau pun lebih dan sebagai proses yang secara sadar untuk melakukan sesuatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pengertian luas administrasi dapat dilihat dari 3 aspek pengertian dari sudut pandang oleh (Sondang P. Siagian. 2015, hal, 2) yaitu : pertama administrasi sebagai seni adalah suatu dimana seseorang prosesnya yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Sudut pandang kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, mempunyai tujuan yang hendak dilaksanakan, adanya tugas-tugas yang harus dicapai, adanya perlengkapan, peralatan, waktu dan tempat serta lainnya. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerja sama didalam sebuah kelompok atau organisasi.

Terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definis administrasi, yang dikemukakan oleh (Zulkifli dan Moris Adidi Y. 2014, hal, 11-12) yaitu :

- a. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional, administrasi sangat terikat pada aspek-aspek, kondisi, waktu, dan tempat dimana dia dijalankan.
- b. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang manusia atau lebih adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas- yang harus dilakukan, dan peralatan, perlengkapan dalam melaksanakan tugas.
- c. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru. Sudah ada sejak dijalankan manusia mengenal peradaban.

Bahwa dapat diartikan bahwa administrasi ini memiliki seorang yang mau melaksanakan sampai pada perumusan dan mempertahankan tujuan yang ingin dicapai. Juga memiliki bagian-bagian atau unsur disetiap anggotanya dan memiliki fungsi sebagai pembantu dalam kerja sama. Dan juga administrasi memiliki unsur eksekutor atau yang memiliki fungsi untuk melaksanakan segala rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal lain administrasi ini tidak boleh di tanggapi sebagai hal yang sangat sederhana karena administrasi ini merupakan proses dari setiap unsur yang spesifik dan pembahasan administrasi juga sangat luas dan administrasi ini menjadi sistem yang sangat baik dalam rangka mengelola segala bentuk sumber daya yang ada, baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi lainnya.

Pengertian konsep diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk membantu dalam memecahkan suatu masalah dan membantu mempermudah dalam kegiatan manusia, dalam konsep ini menjadi sebuah sistem yang terhimpun terdiri dari kaedah-kaedah beberapa yang menyagkut dalam penyelesaian masalah dari urusan dan kegiatan pada manusia. Konsep ini juga termasuk pada konsep metode yang dirumuskan untuk mempermudah, dan unuk melakukan segala aktifitas yang lebih baik, inilah mengapa menjadi alasan penting administrasi memiliki kedudukan yang begitu baik dan keberadannya sangat berpengaruh dan memiliki fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

2. Konsep New Publik Service

Paradigma New Publik Service dimaksudkan untuk meng-“counter” paradigma administrasi administrasi yang mnjadi arus utama (mainstream) saat ini, yakni paradigma New Publik Management (npm) yang berprinsip “runoverment like a business” atau “market as solution to the illss in publiksector”)pasar sebagai solusi untuk sektor publik yang sakit). “Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama yang lamban, kaau dan birokrari siap menjawab tantangan pada era globalisasi.

Menurut Denhaert dan Denhardt (dalam Beddi Irawan M. 2017, hal, 304) mengatakan karena kepemilikan kepentingan publik sebenarnya adalah masyarakat, maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatian pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga melalui pengelolaan

organisasi dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai harus dikedepankan, dan peran sebahai pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut new publi service.

Perspektif new publik service menghendaki peran administrasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas, administrasi publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawan harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi dalam melaksanakan program-program agar mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat.

New Publik Service telah memberikan ruang untuk perubahan dalam memandang apa yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, perspetif ini mengendeoanan kepetingan sebagai warga negara dalam konte penyelenggaraan pemerintahan, dan perubahan dlam bagaimanan administarator menjalankan tugas untuk memenuhi kepentingan banyak publik.

Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik, pelayanan kepada masyarakat agar admnistrasi berjalan dengan bagus yang dikelola oleh admnistrator publik itu sendiri, sekaligus fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam peemerintahan.

Menurut Denhardt dan Denhardt (dalam Beddy I Maksudi. 2017, hal, 313-315) mengemukakan 7 prinsip pokok New Publik Service yang saling melengkapi, yaitu :

1. Serve Citizens, Not Customers (Melayani Warga Negara, bukan Pelangan)

Kepentingan publik merupakan dialog bersama tentang nilai kebersamaan dari pada kepentingan pribadi individu. Oleh karena itu pelayanan publik tidak hanya respon terhadap permintaan pelanggan juga lebih fokus terhadap pada hubungan saling kepercayaan antara warga negara.

2. Seek the Public Interest (Mengutamakan Kepentingan Publik)

Administrator publik harus berkontribusi terhadap membangun kepentingan publik. Adanya kreasi kepentingan dan pertanggungjawaban yang lahir atas dasar dan nilai saling berbagi.

3. Value Citizenship over Entrepreneurship (Nilai Kewarganegaraan Lebih Baik dari pada Kewirausahaan)

Bahwa kepentingan publik lebih jauh sangat penting jika dijalankan dengan komitmen pelayanan publik dan warga negara berkontribusi dalam menciptakan yang bermakna.

4. Think Strategically, Act Democratically (Berpikir Strategis, Bertindak Demokrasi)

Kebijakan program yang mempertemukan kebutuhan publik akan sangat efektif jika dicapai melalui upaya yang kolektif dan proses kolaboratif.

Keterlibatan warga negara sangat penting sebagai bagian strategi yang tepat dan perlu dari implementasi kebijakan. Administrator harus bekerja secara etis dan bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan pelayanan publik.

5. Recognize that Accountability Is Not Simple (Kenali Akuntabilitas yang tidak Sederhana)

Aparatur pelayanan publik harusnya penuh perhatian kepada masyarakat, mengikuti peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

6. Serve Rather than Steer (Melayani Daripada Mengarahkan)

Administrator bekerja berdasarkan jiwa kepemimpinan dan berbasis nilai membantu warga negara dalam pelayanan kepentingan masyarakat.

7. Value People, Not Just Productivity (Nilai manusia, Bukan Sekedar Produktivitas)

Organisasi publik dan jaringan dimana mereka berpartisipasi akan memberikan hasil jangka panjang yang baik jika mereka bekerja dengan proses-proses kolaboratif dan berdasarkan rasa hormat terhadap masyarakat,

Dapat disimpulkan pengertian diatas bahwa New Publik Service ini memiliki jiwa administrasi yang bagus dalam membangun sebuah organisasi. Menjelaskan bahwa administrator harus bekerja sama atau berkolaborasi dalam proses administrasi agar pelayanan administrasi ini berjalan dengan baik. Konsep New Publik Service lebih mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi atau individu seseorang, berpikir strateis sbeleum melakukan tindakan. New Publik Service lebih melayani atau mengedepankan kepentingan publik dari pada mengarahkan, dan juga memberika partisipasi nilai manusia, rasa hormat terhadap seluruh masyarakat.

3. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu bagian terpenting dan keberadaannya yang meruapak suatu yang berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan dari setiap yang hendak dicapai, organisasi juga merupakan tempat atau wadah dalam mengelompokkan orang dan sekaligus terdapat beberapa unsur pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya suatu pencapaian kegiatan bagi yang sudah ditetapkan tujuan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat tentang organisasi, ada beberapa pengertian yang memberikam pengetahuan tentang organisasi, yang dikatakan oleh (Siagian S. P., 2015, hal. 96) dia mengatakan organisasi alah tempat diman kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Sebagai organisasi yang bersifat relatif statis, dan setiap organisasi harus memiliki pola struktur yang relatif permanen agar suatu organisasi ini memiliki pencapaian tujuan yang baik.

Pengertian lain juga mengatakan bahwa organisasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandangan, yang pertama, bahwa organisasi dapat dikatakan sebagai “wadah” dan dimana kegiatan ini dijalankan. Kedua organisasi dipandang sebagai “proses” dimana dimana analisis interaksi antara orang-orang yang ada di organisasi(Siagian, Sondang P, 2015,hal 96) yang berarti bahwa apabila organisasi sebagai wadah maka organisasi tersebut adalah sebagai tempat aktivitas-aktivitas keseluruhan dari manajemen-manajemen serta aktivitas administrasi organisasi yang dilakukan.

Selanjutnya jika kita memahami bahwa organisasi sebagai Proses maka lebih memfokuskan kepada bentuk interaksi-interaksi orang yang ada di dalam organisasi, hal ini menyangkut kepada sikap dan perilaku orang yang berada dalam organisasi tersebut.

Dari penjelasan diatas, semakin menguatkan asumsi bahwa peranan organisasi ini sangat penting didalam kehidupan manusia, karena jika manusia itu sendiri mndapatkan suatu masalah maka manusia tersebut perlu membawanya ke suatu orang atau organisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Organisasi ini adalah sebagai wadah pelaksanaan kerja sama sejumlah personil, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukkan staff, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi. Penelaah terhadap prinsip-prinsip organisasi ini juga dikaitkan dengan aspek-aspek studi administrasi dan manajemen. .

Dari literatur diatas, meskipun rumusan yang diberikan para ahli nampak berbeda namun titik umum pandangan adalah sama, yaitu suatu organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasi atau terkoordinasi, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.

Atas dasar pemahaman tersebut, ditemukan berbagai unsur utama yang menimbulkan terbentuknya organisasi, yaitu :

- a. Adanya sekelompok orang
- b. Adanya kerjasama
- c. Adanya pengaturan hubungan dan
- d. Memiliki tujuan yang hendak dicapai organisasi

Dengan begitu, kehadiran organisasi sangatlah memberikan banyak manfaat bagi seorang individu maupun kelompok yang bergabung dalam suatu organisasi.

4. Konsep Manajemen

(Siagian, Sondang, P. 2015, hal. 5) menyebutkan dengan beberapa artian yang mendefinisikan dari sudut perspektif, yaitu sebagai proses penyelenggaraan dari berbagai kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan organisasi dan menjadikan kemampuan atau keahlian dari orang-orang yang menduduki jabatan manajer, hal ini ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan didalam manajemen itu sendiri.

Manajemen bukan sebagai unsur yang kehadirannya tidak berarti sama sekali dan kehadirannya bukan karena tanpa sebab, manajemen adalah unsur yang

tidak dapat dipisahkan di dalam organisasi, karena dapat dilihat sangat pentingnya manajemen, karena kedudukannya menjadi penggerak dari organisasi itu sendiri, bahwa dapat diartikan manajemen tersebut merupakan mesin yang menggerakkan organisasi tersebut, tanpa adanya manajemen maka organisasi akan kaku dan tidak akan melakukan apa-apa.

Dikatakan George R. Terry dan Leslie W. Rue (dalam Beddy Irawan M, 2017, hal, 79) dia mengatakan manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaan adalah “managing” mengelola sedangkan pelaksanaannya disebut managet atau pengelola.

Secara umum manajemen memiliki arti bahwa posisinya berperan dalam menjalankan organisassi dalam suatu keadaan yang terstruktur, manajemen memiliki peran yang merubah perspektif bahwa suatu pelaksanaan tidak dapat dilakukan dengan sendiri, maka dari itu manajemen ditunjukkan sebgai bentuk pengorganisasian tugas terstruktur adanya beberapa bentuk dari pembagian tugas. Sehingga suatu kegiatan organisasi bisa berjalan dengan baik dan lebih tersusun, dengan adanya manajemen ini juga merupakan jiwa dalam organisasi, dengan adanya manajemen yang baik, maka suatu organisasi akan hidup dan berkembang dengan baik pula.

Masing-masing fungsi manajemen mendapatkan penjelasan secara singkat yaitu menurut (beddri Irawan M. 2017, hal 83-85)

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang diinginkan dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya tujuan.

b. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan atau manager setelah selesai membuat perencanaan, maksudnya untuk mengorganisir segenap sumber daya yang ada.

c. Actuating (Pengarahan)

Pengarahan adalah mengarahkan orang-orang yang ada dalam organisasi yang mau bekerja dengan penuh semangat dan kerja keras untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan efisien dan efektifitas.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan adalah mengawasi gerakan organisasi ini apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi sumber daya yang ada ada dalam organisasi agar dipakai secara efektif dan efisien tanpa adanya simpang siur dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

George R, Terry (dalam Beddy Irawan M, 2017, hal 81) juga menambahkan tentang fungsi manajemen yang disingkat menjadi POAC, Planning (Perencanaan), Organizing(Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan), dan Controlling (pengawasan)

Pengertian diatas berarti manajemen merupakan intrumen pengelolaan dan optimalisasi seluruh kegiatan yang ada dalam organisasi dengan mengupayakan kinerja orang yang mau bekerja di organisasi yang semua ini di arahkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang optimal serta efektif dan efisien demi tercapainya suatu kualitas kinerja organisasi yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki pengertian bahwa merupakan sebuah unsur dari beberapa tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan beberapa bentuk pelaksanaan dalam pengorganisasian dengan melibatkan kerja sama dari orang-orang yang memiliki keterampilan yang tergabung di dalam suatu wadah atau tempat bekerja. Dalam rangka penentuan dari tujuan organisasi tersebut harus adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

5. Konsep Manajemen Strategis

Menurut fred R. David. (2012:4) mendefinisikan manajemen Strategis adalah sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, meginplementasikan, serta mengevaluasikan keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Menurut Sedarmayanti (2014:5) Manajemen Strategi merupakan sistem sebagai satu kesatuan, memiliki berbagai komponen saling berhubungan, saling mempengaruhi dan bergerak serentak bersama-sama ke arah yang sama. Manajemen strategi memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang organisasi.

Sedangkan Menurut Irham Fahmi dalam buku manajemen Strategis (2017: 2) mendefinisikan manajemen strategis adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka panjang. Salah satu fokus dalam manajemen strategi ini memberikan dampak penerapan konsep strategi kepada perusahaan, organisasi dalam jangka panjang.

Menurut Sondang P. Siagian (2016:27) Manajemen Strategik adalah suatu proses yang dinamis karena berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan dimasa depan. Salah satu alasan utaa mengapa demikian halnya karena kondisis yang dihadapi oleh suatu organisasi, baik yang sifatnya internal dan eksternal selalu strateginya berubah-ubah.

Dengan kata lain manajemen strategi ini agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektivitas dan produktivitas agar tujuan yang dihasilkan memuaskan.

D. Hunger & Thomas L. Wheleen (2003:4) mengemukakan Manajemen Strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen Strategis ini meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta

pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2016:3-4) mengemukakan manajemen strategis adalah mengintergrasikan antara perencanaan strategi dengan upaya yang bersifat selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisien anggaran, optimalisasi penggunaan sumber daya organisasi, evaluasi program, pemantauan dan penilaian kinerja serta pelaporan kinerja.

Menurut Nawawi dalam mengimplementasikan manajemen strategis di lingkungan organisasi terdapat beberapa manfaatnya yang dapat memperkuat untuk mewujudkan agar dapat secara efektif dan efisien sebagai berikut :

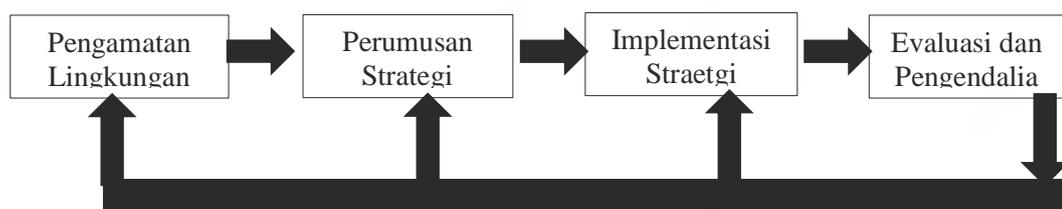
1. Organisasi kerja menjadi dinamis karena Renstra dan Renop harus terus menerus menyesuaikan dengan kondisi realistik organisasi (analisis internal) dan analisis lingkungan (analisis eksternal) yang selalu berubah-ubah dalam pengaruh globalisasi.
2. Implementasi manajemen strategi melalui berfungsi sebagai pengendalian dalam mempengaruhi semua sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, agar terus berlangsung berproses yang efektif dan efisien
3. Manajemen strategi diimplementasikan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional, dan sistematis, yang menjadikan acuan untuk diperbaiki perumusan dan pelaksanaan RENSTRA dan RENOP

4. Manajemen strategi Dapat berfungsi sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi, dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional, dan global. Sesuai pihak wewenang dan tanggung jawab.
5. Manajemen strategi menuntut semua pihak untuk ikut berpartisipasi yang berdampak untuk peningkatan persaan ikut memiliki (sense of belonging), perasaan ikut bertanggung jawab (sense responsibility), dan perasaan untuk ikut berpartisipasi (sense of participation).

Dapat dipahami bahwa konsep manajemen strategis sangat menentukan suatu keberhasilan organisasi. Malalui strategi suatu lembaga dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program organisasi secara efektif dan efisien sehingga memudahkan tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa konsep diatas bahwa manajemen strategi dapat memberikan manfaat-manfaat yang baik dalam upaya meningkatkan kualitas. Dan suatu rangkaian aktivitas terhadap suatu pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan kompherenshif, serta penetapan strategi-strategi yang telah ditentukan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Gambar II.1. Tahapan- Tahapan Dalam Manajemen Strategi



Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan adalah pencermatan lingkungan dimana kegiatan dalam rangka formulasi rencana strategi melalui penguasaan informasi tentang masalah dalam lingkungan internal dan eksternal.

Tujuan dari pencermatan Lingkungan adalah :

- a. Organisasi mengenali kekuatan dan kelemahan internal serta memaami peluang dan tantangan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa akan datang.
- b. Dengan menggunakan informasi pencermatan lingkungan internal dan eksternal organisasi lebih baik mengambil langkah jangka panjang

Cakupan Pencermatan Lingkungan Strategi

Pencermatan lingkungan internal melakukan pemindahan terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada dilingkungan internal organisasi yang dapat dikelola manajemen yaitu :

- struktur organisasi
- sistem organisasi
- sumber daya organisasi
- anggaran sumber pembiayaan
- faktor pendukung kinerja

Pencermatan lingkungan ekstrenal melakukan pemindaian terhadap peluang dan tantangan yang ada dalam lingkungan eksternal organisasi (yang tidak dapat dikelola manajemen), yaitu :

- Task environment secara langsung berinteraksi dan memengaruhi organisasi seperti : klien, konsumen, stakeholders, dan sebagainya.
- Societal environment umumnya terdiri dari elemen penting yaitu : ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, ekologi, geografi dan lain sebagainya.

Perumusan Strategi

Perumusan strategi pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dan kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi mencakupi menentukan visi misi organisasi, menentukan tujuan agar tercapai tujuan, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses manajemen dimana mewujudkan strategi dan kebijakan dalam suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang dilakukan aktivitas organisasi dan hasil kerja dipantau dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan dengan kinerja yang di ingin. Agar evaluasi dan pengendalian efektif, manajer harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat dan tidak bisa dari orang bawahan yang adala dalam suatu hirarki organisasi.

Dari pengertian diatas tentang tahapan-tahapan manajemen srategi, bahwa untuk menentukan sebuah kebijakan itu perlu adanya pencermatan lingkungan atau dimaksud dengan harus sesuai dengan kondisi ingkungan saat membuat strategi, setelah itu baru bisa rumuskan bagaimana konsep kebijakan yang layak dipakai untuk menentukan tujuan yang di ingin dicapai. Bahwa apabila kebijakan tersebut sudah baik maru diwujudkan strategi-strategi itu didalam organisasi, apakah sesuai dengan kebijakan yang dibuat atau tidaknya maka kita evaluasi kebijakan yang telah dibuat bersama-sama dalam jangka waktu yang tepat.

Konsep Penetapan SasaranManajemen Strategi

Sasaran merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan yang diambil organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran organisassi merupakan bagian integral, tak terpisahkan dari proses perencanaan strategi. Sasaran focusnya pada action, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, yang dapat diukur dan dapat diwujudkan dalam SMART (Spesifik, Measurable, Aggressive and Anatainable, Result-oriented, timebound). Sasaran harus menyatakan alokasi anggaran sumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Sasaran perusahaan atau organisasi penting karena merupakan salah satu tujuan dari proses perumusan perencanaan strategi efektif yang mendukung setiap butir tujuan, dan menyatakan tugas khusus yang harus diselesaikan dalam jangka waktu pendek jika perusahaan ingin sukses. Keberhasilan suatu orgaisasi dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan jangka panjang, sehingga visi misi suatu organisasi tercapai dengan tujuannya.

Suatu rencana harusnya dirumuskan untuk memenuhi sasaran yang mempunyai kualitas bervariasi.

Ciri khusus sasaran organisasi adalah :

1. Harus dapat diukur
2. Harus spesifik karena merupakan panduan organisasi
3. Harus saling bertingkat dimana yang berposisi dibawah mendukung yang ada diatasnya.

Sasaran seharusnya mempunyai ciri SMART

1. Spesifik

Sasaran organisasi harus spesifik karena merupakan panduan untuk kelompok organisasi yang bersangkutan.

2. Measurable

Sasaran perusahaan harus dapat diukur, dapat dipakai untuk mengukur suatu perusahaan. Dimensi yang bisa diukur adalah kuantitas, kualitas, waktu, tempat, anggaran, penanggung gugat.

3. Aggressive and attainable, agresif dan dapat dicapai

Karena sasaran dijadikan standar pencapaian maka harus menantang, karena dapat diwujudkan.

4. Results – Oriented

Sasaran harus sesuai menspesifikasikan hasil suatu tujuan.

5. Timebound

Sasaran dapat menspesifikasikan suatu kerangka waktu yang sangat singkat. Pada dasarnya sasaran harus lebih bisa dikelola, dan terpadu pada proses anggaran.

Suatu sasaran dapat dikembangkan melalui berbagai cara, dan setiap organisasi bisa merasakan proses yang dirasakan yang paling sesuai dengan gaya organisasi itu sendiri.

Setelah menetapkan apa (what) dan kapan (when) sasaran yang kita butuhkan tercapai, strategi organisasi perlu menyatakan bagaimana sasaran itu bisa tercapai.

Strategi untuk mencapai sasaran berkaitan dengan yaitu :

1. Bagaimana target kinerja harus dipenuhi
2. Bagaimana organisasi akan memberikan perhatian kepada pelanggan.
3. Bagaimana organisasi akan memperbaiki kinerja dalam pelayanan dan dalam segi lainnya.
4. Bagaimana organisasi akan melaksanakan suatu misinya.

Sasaran organisasi :

- Menjelaskan tujuan yang akan dilakukan dalam waktu yang efektif
- Dilakukan dalam bentuk kuantitatif
- Memberikan penjelasan pada penyusunan program dan kegiatan yang akan dibuat, sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat tercapai dan terukur.
- Fokus utama menentukan sasaran adalah rencana tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.

Indikator sasaran :

- Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang dilakukan dan sasaran dari organisasi.
- Menjadikan patokan penilaian keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan misi visi suatu organisasi.

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi operasional)

1. Merupakan strategi yang merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
2. Merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya suatu organisasi, meliputi :
 - a. Penetapan kebijakan
 - b. Program operasional
3. Menetapkan strategi harus memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keadaan Lingkungan yang kita akan lakukan.

Kebijakan organisasi

- Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam membuat suatu kebijakan
- Kebijakan merupakan pedoman pelaksana suatu tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilakukan
- Elemen penting dalam pembuatan kebijakan adalah kemampuan menjelaskan strategi kedalam kebijakan yang bisa terpakai dan dapat dilakukan dengan tepat.

Kebijakan organisasi dapat berupa :

- Kebijakan publik
- Kebijakan teknis
- Kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sumber daya manusia, sarana dan prasana)

- Kebijakan pribadi
- Kebijakan keungn
- Kebijakan keuangan

Bahwa dari beberapa menentukan atau menetapkan strategi dalam sebuah organisasi harus dilakukan secara efektif dan efisien, dan perlu sasaran-sasaran yang tepat untuk kita melakukan suatu kebijakan, strategi yang sudah dirancangan bisa dilaksanakan dengan tepat pada waktu yang ditentukan dalam kebijakan strategi.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Manajemen Strategi (Analisis Swot)

Analisis lingkungan Internal

Analisis Swot merupakan sinkatan dari Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) internal dari suatu perusahaan serta Opportunities (peluang) Dan Threats (ancaman) lingkungan eksternal yang dihadapi. Analisis Swot merupakan teknik historis yang terkenal dimana pimpinan menciptakan gambaran umum secara tepat mengenai situasi organisasi. Analisis ini merupakan pada asumsi bahwa strategi efektif diturunkan dari “ kesesuaian” yang bisa tercapai antara sumber daya internal organisasi. (kekuatan dan kelemahan)

Dengan situasi eksternal (peluang dan ancaman). Sesuatu yang sesuai akan memaksimalkan kekuatan dan peluang organisasi serta meminimalkan kelemahan ancaman.

Formulasi Strategi

Tahap formulasi atau pelaksanaan strategi adalah dimana strategi diawali dengan perumusan visi, misi dan nilai. Selanjutnya menentukan dengan cara menganalisis/melakukan pencermatan lingkungan Internal dan Eksternal.

Berdasarkan konsep Fred R. David dilakukan melalui beberapa matriks dengan tiga tahapan pelaksanaan, yaitu :

1. The Input Stage (tahap masukan)

Semua informasi organisasi mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi dirangkum oleh yang membuat strategi. Dapat dilakukan dengan melakukan dua teknik formulasi strategi, yaitu :

- a. matrik External Factor Evaluation (EFE)

digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal organisasi. Data-data eksternal suatu organisasi dikumpulkan untuk di analisis seperti menyangkut permasalahan : ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi. Karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung dan tidak langsung pada suatu perusahaan.

- b. matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Dilakukan untuk mengetahui faktor internal organisasi berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap berguna. Data dan informasi terdiri dari aspek : manajemen, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran.

2. The Matching Stage (Tahap pencocokan)

Membuat strategi dilakukan identifikasi alternatif strategi dengan mencocokkan pembuatan input berupa faktor eksternal dan internal yang diperoleh pada tahapan input. Pada tahapan pencocokan ini, dilakukan identifikasi hanya dengan menggunakan matriks Swot (Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threat).

Matriks Threats-Opportunities-weaknesses-Strengths (TOWNS) penting untuk membantu manajer mengembangkan membantu manajer dalam mengembangkan empat tipe strategi yaitu :

1. Strengths-Opportunities (SO): mengembangkan strategi dalam memanfaatkan peluang (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada
2. Weaknesses-Opportunities (WO) mengembangkan strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. Strengths-Threats (ST) mengembangkan strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman (T)
4. Weaknesses-Threats (WT) Mengembangkan strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).

3. Decision Stage (Tahap Kelanjutan)

Metode yang dipakai adalah menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Merupakan teknik yang secara objektif dapat menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan. Metode ini adalah alat yang

direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melaksanakan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan faktor kunci kesuksesan internal-eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.

6. Konsep Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan sesuatu.

David Hunger dan Thomas L. Wheleen (2011, hal, 295) mendefinisikan pelaksanaan adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan kebutuhan untuk dapat dijalankan sebuah perencanaan strategi. Pelaksanaan juga merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubahnya suatu tindakan melalui pengembangan program dan prosedur. Pelaksanaan strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa pelaksanaan memperlihatkan pada aktivitas, adanya aksi tindakan atau mekanisme pada suatu organisasi. Bahwa pelaksanaan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh yang berdasarkan norma tertentu untuk mencapai dalam suatu tujuan.

Walaupun pelaksanaan biasanya dilakukan banyaknya pertimbangan setelah strategi telah disusun, pelaksanaan adalah merupakan kunci kesuksesan dalam melaksanakan sesuatu dalam organisasi. Dapat kita artikan bahwa pelaksanaan dalam organisasi sangat penting menentukannya suatu strategi ini

berjalan dengan baik atau tidaknya.yang mana dalam kegiatan melibakan bebrapa unsur disertai usaha

Ada beberapa unsur dalam melakukan implementasi strategi yaitu :

1. Sistem pelaksanaan

Sistem pelaksanaan mencakupi langkah yang perlu disiapkan dalam rangka menjamin pencapaian sasaran dan tujuan dalam Sedarmayanti (2016 hal, 154), meliputi :

1. Bentuk organisasi pelaksanaan
2. Tunjuk pelaksanaan
3. Buat SOP (Standar Operation Procedure)
4. Siapkan sarana
5. Siapkan anggaran
6. Buat jadwal pelaksanaan
 - Pengumpulan data kinerja
 - Diperlukan rencana pengumpulan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja
 - Data kinerja dapat diperoleh dari dua sumber :
 1. Data internal, berasal dari sistem informasi dan pada instansi yang bersangkutan.
 2. Data eksternal, berasal dari luar intansi (data primer dan sekunder)
 - Perlu direncanakan sistem inforasi kinerja yang mengintegrasikandata yang dibutuhkan.

Dapat diartikan penjelasan diatas bahwa pelaksanaan harus mempunyai sistem agar menjamin pelaksanaan yang dilakukan organisasi ini dapat berjalan dengan semestinya. Bahwa pelaksanaan ini merupakan unsur terpenting dalam organisasi untuk mengerjakan program-program yang telah ditentukan sebelumnya.

2 .Sistem Pemantauan

Pemantauan adalah proses untuk mengetahui adanya kesesuaian, penyimpangan antara pelaksana dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

Fungsi pemantauan adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam rangka azas disiplin
- b. Untuk dapat dilakukan auditing terhadap sumber daya dan tingkat pelayanan yang dicapai untuk memperoleh informasi dalam rangka membantu adanya perubahan sosial ekonomi sebagai outcome dari program organisasi.
- c. Menghasilkan informasi outcome dari program berhasil atau gagalnya kegiatan.

Pemantauan yang efektif memerlukan :

- a. Spesifik standar dari suatu program kegiatan
- b. Adanya ketentuan mengenai toleransi
- c. Prosedur pengumpulan informasi untuk umpan balik

Sistem pemantauan terdiri dari

- a. Pencatatan pelaksanaan kerja dan tindakan berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan
- b. Pelaporan terhadap hasil catatan termasuk adanya penyimpangan terhadap rencana, lengkap dengan rencana yang diusulkan
- c. Tanggapan dari penanggung jawab pelaksanaan kerja sehingga pelaksanaan program kegiatan tetap berlangsung

Tanggapan dan pelaporan pemantauan dapat bersifat koreksi atau pencegahan. Tindakan koreksi dilakukan apabila timbul klaim atau keluhan dari pelanggan internal dan eksternal. Penanggulangan dilakukan dengan penyelidikan terhadap masalah, analisis untuk mencari jalan keluar, kemudian menyusun rencana tindakan dan implementasinya Plan, Do, Check, and Action (PDCA). Hasil dilaporkan kepada atasan langsung dari yang bersangkutan. Tindakan pencegahan dilakukan dengan prosedur yang sama, dimana perlu tindakan yang diambil adalah bersifat preventif. Tindakan pencegahan didokumentasikan agar pantauan efektifitas fungsi ini perlu dilekatkan dalam komponen organisasi karena ini sangat perlu dalam pemantauan organisasi.

3. Sistem Pengawasan

Tujuan pengawasan untuk mengetahui,

- a. Apakah jalannya program dan keuangan telah dilakukan secara akurat dan akuntabel
- b. Apakah resiko terhadap organisasi dapat diidentifikasi dan dilakukan tindakan untuk meminimalkan

- c. Apakah peraturan perundangan, prosedur kerja dan intruksi kerja telah dilakukan
- d. Apakah standar dilakukan
- e. Apakah SOP (Standar Operation Procedure) digunakan efisien dan akuntabel
- f. Apakah tujuan dan sasaran telah dicapai

Semuanya ini adalah untuk membantu masing-masing unit kerja organisasi supaya dapat melaksanakan tugas secara efektif. Pengawasan seharusnya dilakukan oleh unit organisasi yang berdiri bebas dan terdiri dari para profesional yang bisa memberikan saran jalan keluar pemecahan masalah suatu organisasi. Pengawasan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, kecuali pada kegiatan atau kegiatan yang menurut pemantauan mengandung banyaknya penyimpangan.

Bisa kita simpulkan bahwa 3 sistem ini adalah jalanya suatu organisasi agar berjalan dengan baik dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini adalah penentu untuk mengendalikan sebuah organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan manajemen strategi di sektor publik didasari dengan pertimbangan pentingnya monitoring (pemantauan) terhadap efisien dan efektivitas sektor publik. Dalam manajemen strategi, alokasi sumber daya, delegasi manajemen, monitoring dan pengukuran kinerja dapat diamatai sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa kinerja publik adalah akuntabel. Ada empat prinsip implementasi menurut Sedarmayanti (2016, hal, 94) yaitu :

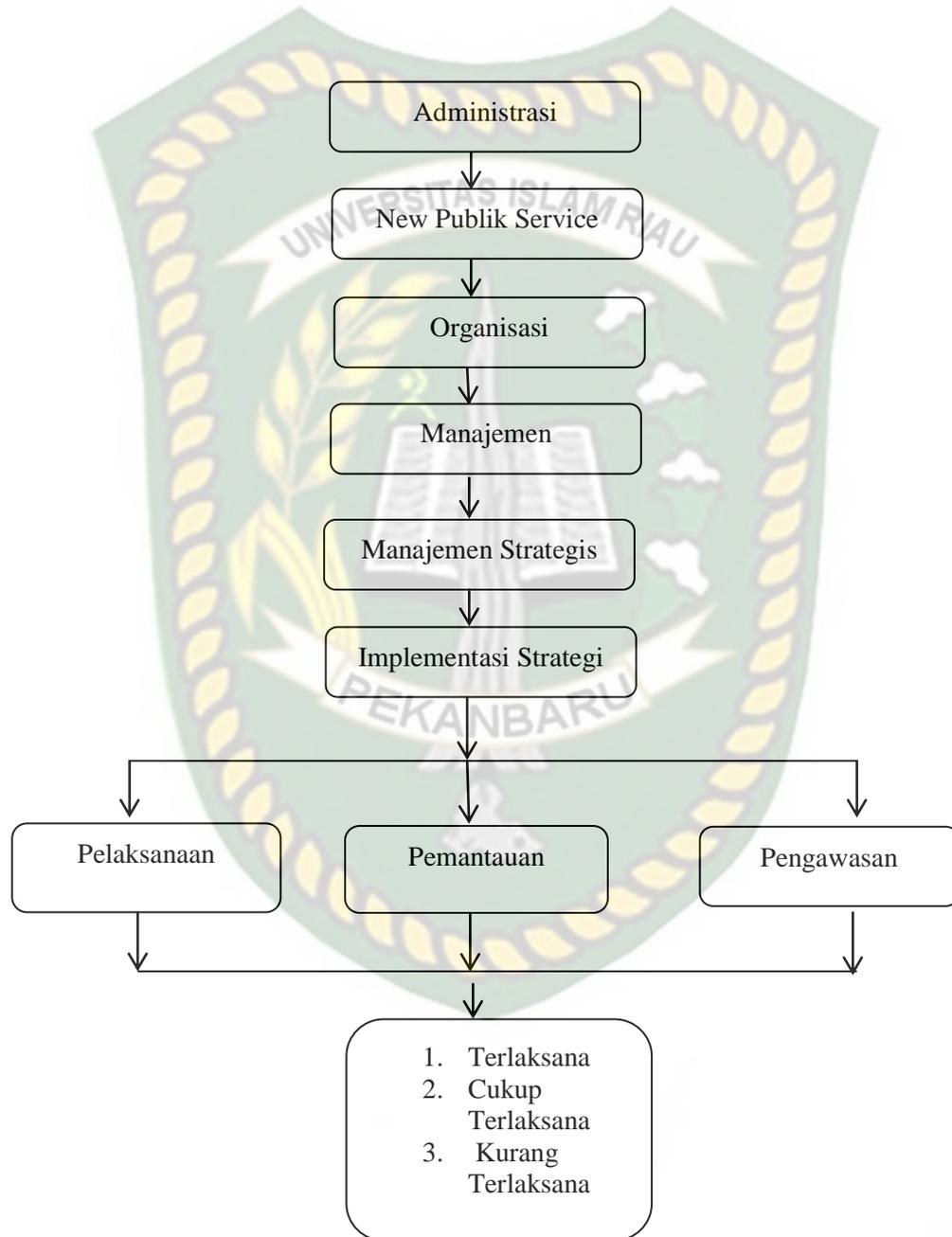
1. Perhatian pada jangka panjang
2. Pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hirarki yang jelas
3. Kesadaran bahwa manajemen strategi dan perencanaan strategi membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk dapat dilaksanakan
4. Perspektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap lingkungan, tetapi merupakan antisipasi.

Dari pengertian diatas bahwa sebelum melaksanakan tugas-tugas tersebut kita harus memperhatikan empat prinsip diatas, agar apa yang dilaksanakan berjalan dengan sempurna, dan tahap ini adalah tahap pengukuran kinerja organisasi yang merupakan subjek penilaian masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Dari ke 3 konsep manajemen (Sedarmayanti,2016, hal 154-157). Peneliti mengambil ketiga indikator tersebut sebagai indikator yang dijadikan ukuran dalam Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penagganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Gambar 11.2 Kerangka Pikir Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.



C . Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah ataupun konsep terkait penelitian ini, maka penelitian memberikn beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama anatra dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. New publik service adalah paradigma yang berdasarkan atas konsep-konsep yang ada pada hakikatnya sesuai nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat.
3. Organisasi adalah wadah atau tempat dimana seseorang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen adalah seni untuk memengaruhi seseorang agar orng lain mau melakukan sesuatu tanpa merasakan terpaksa atau dengan kesukaan hati.

4. Manajemen strategis adalah proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi, untuk mencapai suatu tujuan.
5. Implementasi Strategi adalah pelaksanaan atau rencana suatu aktivitas-aktivitas organisasi dalam membentuk sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Pelaksanaan

- a. Bentuk organisasi

Bentuk organisasi merupakan sebuah hubungan tanggung jawab yang digunakan dalam organisasi

b. SOP (Standar Operation Procedure)

SOP (Standar Operation Procedure) adalah SOP dari organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

c. Anggaran

Kondisi anggaran yang ada di organisasi tersebut

2. Pemantauan

a. Tindakan Pelaksanaan

Pencatatan pelaksanaan kerja dan tindakan berdasarkan rencana yang ditetapkan

b. Pelaporan

Pelaporan terhadap hasil catatan termasuk adanya penyimpangan terhadap rencana standar, lengkap dengan rencana tindakan yang diusulkan

c. Tanggapan

Tanggapan dari penanggung jawab pelaksanaan kerja sehingga pelaksanaan program/kegiatan tetap berlangsung

3. Pengawasan

a. Sasaran

Tujuan dan lingkup pengawasan

b. Identifikasi

Identifikasi komitmen kebijakan pemimpin organisasi sebagai landasan utama

c. Penilaian

Penilaian atas tindakan pencegahan yang pernah dilakukan

D. Operasional Variabel

Perincian konsep operasaional dan operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 : Operasional Variabel Strategi Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Implementasi strategi adalah proses manajemen dimana mewujudkan strategi dan kebijakan dalam suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran,dan prosedur. Menurut Sedarmayanti (2016:114)	Implementasi Strategi	1.Pelaksanaan 2.Pemantauan 3. Pengawasan	a. Bentuk Organisasi Pelaksana b. Tunjuk Pelaksanaan c. SOP (Standard Operation Procedure) d. Anggaran a. Tindakan pelaksanaan b. Pelaporan c. Tanggapan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana

Sumber : Modifikassi Penulis 2021

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert yaitu merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk pengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam

penelitian sosial, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang disebut variabel penelitian.

Dalam skala likert variabel yang akan diukur dan kemudian dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang dijawab oleh responden.

Untuk keperluan analisis secara kuantitatif maka jawaban dapat diberi skor yaitu :

1. Terlaksana, diberi skor 3
2. Cukup Terlaksana, diberi skor 2
3. Kurang Terlaksana, diberi skor 1

Untuk mengetahui Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan maka akan ditetapkan melalui pengukuran skaa yang digunakan untuk setiap indikator dan variabel dalam penelitian, sebagai berikut :

Terlaksana : Jika rata-rata jawaban responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan studi yang telah ditetapkan berada pada total skor 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan studi yang telah ditetapkan berada pada total skor 34% -66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan telah ditetapkan berada pada total skor 1% -33%.

Kemudian untuk menentukan pengukuran pada masing-masing indikator variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan , sebagai berikut :

1. Pelaksanaan merupakan komponen yang signifikan dalam implementaasi strategi

Terlaksana : Jika rata-rata jawaban responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 34% -66%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 1% -33%

2. Pemantauan atau melihat kegiatan dalam imlementasi BPBD

Terlaksana : Jika rata-rata jawaban responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 34% -66%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 1% -33%

3. Pengawasan atau pengendalian pelaksanaan dalam implementasi BPBD

Terlaksana : Jika rata-rata jawaban responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 34% -66%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata jawab responden terhadap variabel Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah ditetapkan berada pada total skor 1% -33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif. Karena peneliti bermaksud untuk mengetahui hasil analisa dan informasi yang detail terhadap pada objek penelitian. Peneliti deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimanakah implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kemudian metode yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini yaitu metodologi kuantitatif. Hal ini dikarenakan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2013, hal, 16) dapat diartikan sebagai penelitian didasarkan pada filsafat positivesme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertujuan sebagai bentuk analisa kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai lembaga yang menangani bencana yang ada di setiap daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun sebagai pertimbangan objek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang ada karena di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

penulis mengamati masih banyak dan tingginya titik hotspot kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadi langganan di setiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan membuat resah masyarakat setempat.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2013, hal, 90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi bukan hanya sekedar hanya orang tapi juga objek dan benda-benda yang dimiliki oleh subjek tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka populasi penelitian ini adalah, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pemadam kebakaran, Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

2. Sampel

Menurut Sugiono (2013, hal, 91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu.

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian

No	Pihak	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	1	1	100%
3	Pegawai dan Honorer Dinas BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti	104	17	18%
4	Masyarakat Peduli Api	1010	24	23%
	Jumlah	1116	43	-

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiono, 2011; 91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti digunakan teknik sensus yaitu adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (true value). Atau sering juga disebut parameter.

2. Untuk Pegawai Dinas dan Honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Merani untuk penarikan sampel pada kaegori ini digunakan Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungkan sesuai dengan kreteria-kreteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian.
3. Untuk Masyarakat Peduli Api digunakan teknik accidental sampling, pemilihan sample seccara kebetulan atau aksidental Sampling, juga disebut pemilihan sample konvenien, merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam penelitian, maka yang menjadi sumber data peneltian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil observasi langsung untuk melihat informasi penelitian. Yang berasal dari Informan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran, Masyarakat Peduli api (MPA).

Data yang ingin diperoleh seperti :

- Tanggapan Responden terhadap Kuesinoner penulis tanyakan tentang indikator Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pengawasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti seperti dari berita, internet, buku, jurnal, peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah peneliti, keterangan-keterangan atau dokumentasi lainnya.

Data sekunder dari peneliti seperti :

- Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti
- Peta rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Data jumlah titik api di Kabupaten Kepulauan Meranti
- Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling efisien yang diambil dari responden, kuesioner juga digunakan dalam jumlah responden dengan skala yang cukup besar. Pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner berkaitan dengan indikator variabel penelitian. Cara peneliti menyebarkan angket kepada sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah dengan cara, yaitu penulis kelapangan langsung menemui masyarakat setempat. Kuesioner ini dilakukan kepada Pegawai dan Honorer BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, Masyarakat Peduli Api (MPA).

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan yang lain.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis, dengan wawancara terstruktur ini responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman saat wawancara. Wawancara ini hanya bertanya berupa garis besar terhadap permasalahan akan ditanyakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA)

3. Observasi

Observasi merupakan suatu proses peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat setempat yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Data yang diperoleh langsung peneliti melalui hasil pengamatan objek penelitian yang

ada dilapangan dalam mengamati Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti tempat kejadian kebakaran Hutan dan Lahan yang menjadi masalah. Adapun data yang dapat penulis dari pelaksanaan observasi adalah menyajikan data terkait fakta yang terjadi dilapangan. Dimana sebelum melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2016, hal, 82) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita online, dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa buku, yang berkaitan dengan tentang penelitian.

Dokumentasi yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian adalah seperti tempat-tempat kebakarn yang sudah kebakaran, dokemntasi penulis dengan responden, domentasi degan berkas-berkas pendukung seperti, peta rawan kebakaran, renstra BPBD kabupten Kepulauan Meranti dan dokumentasi lainnya yang menjadi pelengkap dan membuktikan kebenaran penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang diguakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2016. Hal. 169) Statistik Deskriptif adadalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Selatpanjang adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Nama Meranti itu sendiri diambil dari tiga nama yaitu Pulau Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Terletak disebelah Timur Pulau Sumatera antara $1^{\circ}23'36''$ Lintang Utara $0^{\circ}40'$ Lintang Utara dan $102^{\circ}10'40''$ - $103^{\circ}14'$ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Bengkalis.

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti $3.714,19 \text{ km}^2$, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Luas wilayah menurut kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 kecamatan dan memiliki 101 desa/kelurahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1. Penduduk

Salah satu ciri demografi di Indonesia adalah penyebaran penduduk tidak merata. Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 berjumlah 206.115 jiwa. Bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	9.581	9.280	18.861
2.	5-9	8.430	8.351	16.781
3.	10-14	8.287	7.668	15.955
4.	15-19	9.729	9.259	18.988
5.	20-24	9.552	8.835	18.387
6.	25-29	9.265	8.319	17.584
7.	30-34	8.985	8.055	17.040
8.	35-39	8.392	7.408	15.800
9.	40-44	7.683	7.028	14.711
10.	45-49	6.643	5.879	12.522
11.	50-54	5.332	5.118	10.450
12.	55-59	4.925	4.612	9.537
13.	60-64	3.747	3.712	7.459
14.	65-69	2.799	2.655	5.454
15.	70-74	1.537	1.647	3.184
16.	75+	1.615	1.788	3.403
Jumlah Total		106.502	99.614	206.116

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

1. Mata pencarian

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki mata pencarian seperti sagu, karet, pinang, peternakan dan juga nelayan.

B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam upaya mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bertugas membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan bencana dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas baik administrasi maupun teknis dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

Tugas pokok dan Fungsi BPBD kabupaten Kepulauan Meranti dibidang pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pasca bencana mengacu pada peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Tugas pokok
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- h. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi misi BPBD

Badan penanggulangan bencana daerah bernaung pada badan nasional penanggulangan bencana hal ini terjabarum berdasarkan visi dan misi yang ada, sebagai berikut :

- a. Visi BNPB

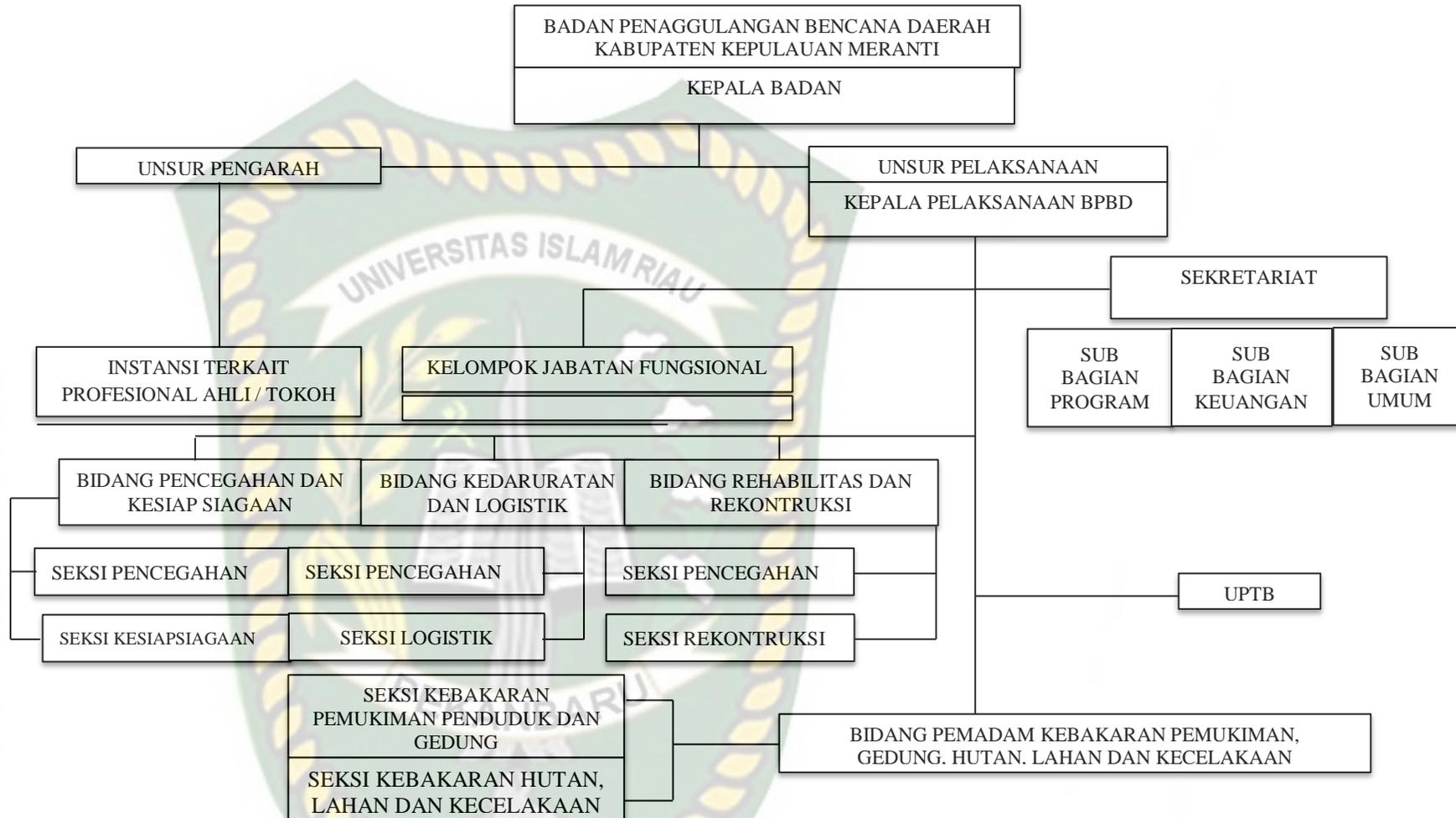
BNPB yang andal dan profesional mewujudkan indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

b. Misi BNPB

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi resiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

C. Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

Dalam penyusunan penelitian ini yang paling berperan sangat penting adalah responden, karena dari responden sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Responden dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, serta menyebarkan kuesioner kepada Pegawai BPBD dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam pengisian kuesioner. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Jumlah Responden Pegawai Dan Honorer Dinas BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	11	65%
2	Perempuan	6	35%
	Jumlah	17	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas jelas bahwa laki-laki lebih dominan hal ini dikarenakan laki-laki memiliki tenaga dan fisik yang kuat dibidang pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Tabel V.2 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	21	88%
2	Perempuan	3	12%
	Jumlah	24	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari data diatas bahwa jenis kelamin laki-laki yang mempunyai peran dalam pemadaman kebakaran dan lebih rasional karena laki-laki memiliki tenaga dan fisik yang kuat ketika dalam penanganan kabakaran hutan dan lahan.

2. Usia

Usia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan, selain itu usia juga daat berpengaruh pada produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi, dan ketahanan fisik dalam bekerja yang mungkin dipengaruhi oleh fahtor daya tahan tubuh dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilihat identitas responden berdasarkan usia.

Tabel V.3 : Identitas Jumlah Responden Pegawai Dan Honorer BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Usia

No	Usia Respon	Jumlah	Persentase
1	20-30	9	53%
2	31-40	8	47%
3	41-50	-	-
4	>50	-	-
	Jumlah	17	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V.3 diatas diketahui bahwa usia sangat mempengaruhi tingkat kerja atau produktivitas kerja. Pegawai yang produktif dalam bekerja adalah usia 20-30 tahun dan 31-40 tahun dibandingkan dengan usia 41-50 tahun. Hal ini dikarenakan bahwa umur 20 sampai 40 adalah yang memiliki tenaga yang masih kuat dalam melaksanakan penanganan kebakran hutan dan lahan.

Tabel V.4 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Usia

No	Usia Responden	Jumlah	Persentase
1	20-30	5	21%
2	31-40	8	33%
3	41-50	8	33%
4	>50	3	13%
	Jumlah	24	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2021

Berdasarkan tabel V.4, dalam pengelompokkan identitas responden dari masyarakat peduli api kabupaten kepulauan meranti bahwa yang mendominasi tingkat usia responden berada pada tingkat usia 31-40 tahun dan 41-50 yang berjumlah 16 orang. Dikarenakan usia 31 sampai 50 tahun merupakan usia yang memiliki pengalaman dan tenaga yang ahli dalam pemadaman kebakaran.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai suatu dari tingkat pendidikan kita alan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku. Setiap orang semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Tabel V.5 : Identitas Jumlah Responden Pegawai Dan Honorer BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SMA	12	71%
4	DIPLOMA	1	5%
5	S1	4	24%
	Jumlah	17	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi cara kerja pegawai BPBD. Semakin tinggi tingkat pendidikan Pegawai dan Honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti maka semakin mampu memberikan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat. Jika semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin terbatas kemampuannya dalam melayani dan penangganan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel V.6 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	5	21%
2	SMP	3	13%
3	SMA	15	62%
4	DIPLOMA	-	-
5	SI	1	4%
	Jumlah	24	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas, bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang menentukan sikap dan pola prilakunya. Semakin tinggi pendidikan masyarakat peduli api maka semakin pentingnya pendidikan.

B. Hasil dan pembahasan data indikator dari

1. Sistem Pelaksanaan

Sistem pelaksanaan adalah langkah yang perlu disiapkan dalam menjamin pencapaian sasaran dan tujuan.

Maksudnya yaitu dalam sistem pelaksanaan memiliki Bentuk organisasi Pelaksana, Tunjuk Pelaksana, SOP (Standard Operation Procedure), dan Anggaran.

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pelaksanaan Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Bentuk Organisasi Pelaksana	13 (76%)	4 (24%)	-	17 (100%)
2	Tunjuk Pelaksanaan	17 (100%)	-	-	17 (100%)
3	SOP (Standar Operation Procedure)	15 (88%)	2 (12%)	-	17 (100%)
4	Anggaran	-	2 (12%)	15 (88%)	17 (100%)
Jumlah		45	8	15	68
Rata-rata		11	2	4	17
Persentase		(66%)	(12%)	(22%)	(100%)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai dan honorer BPBD kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Pelaksanaan berada pada kategori “Terlaksana”

Bentuk Organisasi Pelaksana di BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari sisi Bentuk Organisasi, sangat berjalan baik dalam penanganan

kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari jawaban responden Pegawai BPBD mereka menjawab Terlaksana. Karena mereka dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Tunjuk Pelaksanaan di BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, penunjukan pelaksanaan dilakukan oleh atasan. Dilihat dari jawaban responden mereka menjawab terlaksana. Hal ini dikarenakan pegawai sebelum melaksanakan tugas mereka ditunjuk oleh atasan mereka dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Standar operation procedure (SOP). Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pelaksanaan kerja dan tugas sesuai standar operation procedur, karena SOP ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan didalam pemadaman kebakaran sangat perlu karna kegiatan dilaksanakan secara optimal. Dilihat dari jawaban responden pegawai BPBD mereka menjawab terlaksana. dikarenakan melaksanakan tugas ini harus sesuai SOP.

Anggaran, dilihat dari jawaban responden pegawai BPBD, mereka menjawab kurang terlaksana, hal ini dikarenakan bahwa BPBD tidak ada anggaran dari pemerintah daerah, maka dari itu perlengkapapan BPBD dari segi pemadaman kebakaran belum tercukupi.

Selanjutnya Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti(Bapak Nurman, SH) mengenai indikator pelaksanaan beliau menjelaskan bahwa :

“Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini terdiri dari untuk melaksanakan penunjukkan tentang karhutla ada prosesnya. Pertama, untuk pencegahan itu ditunjuk kabid pencegahan dan kesiapsiagaan, itu tujuannya untuk mensosialisasikan atau memberi pelatihan

kepada masyarakat kita yang dilokasi yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu kabit pencegahan. Kedua kalau misalnya sudah terjadi kebakaran itu ditugaskan atau ditunjukkan kabit kedaruratan dan logistik itu mengkaji dan melihat berapa besar kebakaran itu banyaknya dan kekuatan personilnya berapa dicek dulu itu kabit kedaruratan dan logistik. Ketiga, kalau sudah terjadi kebakaran yang menanganai kebakakran itu kabit kebakaran hutan dan lahan dan kasinya jadi sebelumnya dia mempersiapkan personilnya berapa dibutuhkan dengan jumlah besar kebakakran, itu kabai kebakaran hutan dan lahan. Nanti adanya beberapa hari terjadi kebakran kabit logistik akan mengantarkan logistik, mempersiapkan logistik untuk berangkat. Keempat, sesudah pasca kebakaran itu kabit rehabilitasi dan rekontulasi jadi sudah padam kebakakaran adanya yang mengukurnya atau menghitung kerugian, itulah kabit rehabilitasi dan rekontulasi. Empat itu saling ketergantungan pada waktu-waktu tertentu. Kalau masalah transparansi anggaran cukup terbuka untuk kegiatan ini dan bisa ditanyakan dengan bagian program itu terbuka. Itu sudah ada anggaran tersendiri sub bagian sudah ada anggaran baik itu pencegahan dan kesiapsiagaan itu sendiri dan keduanya logistikitu sudah ada bidang lebih tau tetap kami utamakan kabit kebakran hutan dan lahan suatu tupoksi kami dalam Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang kebencanaan jadi kebakaran itu merupakan bencana asapnya. Dana ini ada dua dari pemda dan pusat BPBD berupa sarana dan prasarna provinsi dan pemerintah pusat kita usulkan.” (Wawancara, rabu 2 Juni 2021, Pukul, 10.00 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa yang menangani kebakaran hutan dan lahan yaitu ada empat kasi yang sangat penting dalam penangganan kebakaran apabila tidak ada 4 kasi ini maka penangganan kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan dengan lancar proses penanganannya, sedangkan anggaran hanya dari BPBD provinsi dan pusat sedangkan pemerintah daerah tidak ada anggranan untuk penagganan kebakaran hutan dan lahan ini.

Selanjutnya berdarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemadam kebakaran (Bapak Ekaliptus,SH) mengenai indikator pelaksanaan, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam melakukan penangganan kebakaran kita melalui hotspot, laporan dari masyarakat, setelah itu kita koordinasi ketitik hotspot yaitu kepala desa, contohnya didesa lukun kita koordinasi bersama kepala desanya, setelah itu kita menyusun tim dan beberapa tim mempelajari situasi kebakaran hutan dan lahan yang ada dilokasi. Kami ditunjuk oleh atsan melalui SK penunjukkan.kita melakukan sesuai dengan Standar Operasional Procedur (SOP) dan kendalanya

Cuma lautan dan pulau-pulau. Dana yang kami pakai dana dari pusat, pemerintah daerah tidak ada memberikan dana". (Wawancara, juni 2021, pukul 10. WIB)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa BPBD dalam bentuk pelaksanaannya melalui titik hotspot dan laporan masyarakat untuk mengetahui titik api dalam menjalankan tugasnya. Sehingga mereka bisa mengetahui posisi kebakaran hutan dan lahan. Penunjukan mereka melalui SK penunjukkan tugas. Dalam melaksanakan kegiatan mereka harus sesuai dengan standar operasional procedurnya akan tetapi terkendala melalui pulau-pulau. Dana BPBD dari BPBD Provinsi dan Pusat dalam melaksanakan kegiatan.

Kemudian berdasarkan observasi penelitian mengenai indikator Pelaksanaan, berada pada kategori "Cukup Terlaksana". hal ini dikarenakan pertama, mengenai Bentuk organisasi BPBD, bahwa BPBD sudah berjalan cukup bagus dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, mereka melaksanakan tugas sesuai arahan dari atasan mereka. Kedua, tunjuk pelaksanaan, mereka ditunjuk melalui SK Penunjukkan dalam melakukan kegiatan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, Standar Operation Procedure (SOP). BPBD melakukan kegiatan sesuai SOP hanya sekitar 80% hal ini diakrenakan keterbatasan jarak dan waktu ditempuh yang cukup jauh. Keempat, Anggaran. Anggaran dari pemerintah tidak ada ini mengakibatkan kinerja BPBD kurang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini dikarenakan alat-alat untuk pemadaman kurang memadai.

Dari hasil penyebaran kuesioner, dan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator pelaksanaan berada pada kategori "Kurang Terlaksana". hal ini dikarenakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan BPBD

tidak sesuai dengan Standar Operation Procedure (SOP) seharusnya dalam melaksanakan penanganan mereka harus cepat tanggap dalam melaksanakan tugasnya agar kebakaran tidak meluas kebakarannya, dan anggaran dari pemerintah daerah tidak ada dalam hal ini untuk membeli peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pelaksanaan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Bentuk Organisasi Pelaksana	20 (83%)	4 (17%)	-	24 (100%)
2	Tunjuk Pelaksana	21 (88%)	3 (12%)	-	24 (100%)
3	SOP	10 (42%)	14 (58%)	-	24 (100%)
4	Anggaran	10 (42%)	14 (58%)	-	24 (100%)
Jumlah		61	35	-	96
Rata-rata		15	9	-	24
Persentase		64%	36%		100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat berada pada kategori “Terlaksana”.

Bentuk Organisasi Pelaksana. Membentuk organisasi pelaksana sesuai dengan kemampuannya adalah hal yang harus terus diupayakan oleh pemimpin untuk menghasilkan sebuah organisasi yang baik dan berkualitas. Kemampuan yang ada didukung oleh pendidikan dan pengalaman kerja. Dilihat dari jawaban responden Masyarakat Peduli Api (MPA) mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan masyarakat peduli api terbentuk sudah terlaksanakan dalam menjalankan tugasnya.

Tunjuk pelaksana. Penunjukan Masyarakat Api (MPA) ditunjuk oleh Kepala Desa agar bisa membrantaskan kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari jawaban responden masyarakat peduli api mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan penunjukan mereka di tanda tangani melalui SK Masyarakat Peduli Api (MPA).

Standar operation procedure (SOP) adalah petunjuk kegiatan dalam melaksanakan kegiatan, agar pelaksanaan yang dilakukan dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan kerja yang baik. Dilihat dari jawaban responden masyarakat peduli api MPA mereka menjawab cukup terlaksana. Dikarenakan hal ini Masyarakat Peduli Api (MPA) hanya 80% sesuai SOP dikarenakan sesuai situasi dan kondisi dilapangan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Anggaran,dilihat dari jawaban responden Masyarakat Peduli Api (MPA) mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan mereka digaji oleh Pemerintah Desa setempat dan mereka digaji ketika terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Pelaksanaan, berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. hal ini dikarenakan Masyarakat Peduli Api (MPA), dalam melaksanakan pemadaman mereka tidak mengikuti Standar Operation Procedur(SOP) saat pemdamanan kebakarn hutan dan lahan hal ini dikarenakan mereka hanya mengandalkan pengalaman mereka. Dan anggran mejadi faktor kerja mereka dalam pemadaman kebakaran. Masyarakat Peduli Api (MPA) hanya dibayarkan ketika mereka melaksanakan tugasnya diwaktu terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, setelah itu

mereka tidak digaji setiap bulannya, ini bisa menjadi faktor dalam melaksanakan pekerjaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator pelaksanaan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, hal ini dikarenakan bahwa Masyarakat Peduli Api (MPA) mereka tidak mengikuti sesuai standar operation procedure sop dan Masyarakat Peduli Api (MPA) mereka dibayar gaji hanya pada waktu kebakaran saja, tidak ada gaji perbulan bahwa ini bisa menjadi faktor Masyarakat Peduli Api (MPA) melakukan pemadaman tidak sesuai SOP.

2. Pemantauan

Pemantauan adalah proses untuk mengetahui adanya kesesuaian, penyimpangan antara pelaksana dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pemantauan Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Tindakan Pelaksana	11 (65%)	6 (35%)	-	17 (100%)
2	Pelaporan	11 (65%)	5 (29%)	1 (6%)	17 (100%)
3	Tanggapan	16 (94%)	1 (6%)		17 (100%)
Jumlah		38	12	1	51
Rata-Rata		13	4	0	17
Persentase		75%	23%	2%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggpan pegawai BPBD kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator pemantauan rata-rata berada pada posisi “Terlaksana”

Tindakan Pelaksanaan. Dalam tindakan pelaksanaan pegawai melakukan pencatatan tindakan saat adanya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari jawaban responden pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan pegawai harus mencatat setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Pelaporan. Dilihat dari data yang didapat peneliti pegawai BPBD melakukan laporan atau pemberitahuan kepada atasan setiap kejadian. Dilihat dari jawaban responden pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan pegawai BPBD melakukan pelaporan atas setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tanggapan, dilihat dari jawaban responden pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, mereka menjawab terlaksana. karena pegawai BPBD ini memiliki tanggung jawab terhadap terjadinya bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Bapak Nurman, SH) mengenai indikator pemantauan beliau menjelaskan bahwa :

“kalau pencatatan dan pelaporan itu sedang terjadi kebakaran kasi kami akan melaporkan lewat wa dulu beberapa tahapnya misalnya, persentase kebakaran yang sudah kami tangani dan pelaksanaan itu, sesudah itu baru kita laporkan oleh administrasi dibagian kebakaran hutan dan lahan itu, terus melaporkan ke Bupati terus lagi ke Sekda ke Provinsi ke Pusat dilaporkan untuk itu setiap kejadian dilaporkan.kalau tanggung jawab itu merupakan kebakaran utan dan lahan ini merupakan tupoksi kita berarti kita komitmen kita sangat beratnanggung jawab itu bekerja sama dengan TNI,POLRI, beserta Satpol pp Kecamatan dan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan ditambah pihak ke tiga perusahaan yang ada dilokasi tersebut kalau ada begitu”. (Wawancara, 2 Juni 2021, Pukul 10.00.WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan pencatatan administrasi dan pelaporan kepada BPBD Provinsi dan Pusat , pelaporan dan pencatatan ini dilakukan mereka setiap terjadinya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Bahwa pencatatan dan pelaporan ini sangat penting bagi BPBD itu sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala bidang pemadam kebakaran (Bapak Ekaliptus, SH) mengenai indikator pemantauan, beliau menjelaskan bahwa :

“Pencatatan pelaksanaan mulai dari kami berangkat sudah dicatat jam hingga tanggal kejadian. Setiap kejadian kami laporkan dan kami dokumentasikan Sesuai dengan motto kami pantang pulang sebelum padam, jadi sebelum api padam kami belum pulang”. (wawancara,2 juni 2020, Pukul 11.00. WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa mereka melakukan pencatatan dan pelaporan saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari mulai pergi hingga tuntasnya kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Berdasarkan Observasi peneliti, indikator pengawasan berada pada kategori “Terlaksana” hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tugas pencatatan dan pelaporan sesuai perintah atasan.

Jika dilihat dari teknik dokumentasi bahwa mereka memiliki data yang cukup lengkap seperti, peta rawan kebakaran dan titik hotspot dari tahun ketahun.

Dari hasil penyebaran kuesinoner, wawancara, observasi dan dokumentasi diatas dapat penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator pemantauan berada pada kategori “ Terlaksana”. hal ini dikarenakan pencatatan pelaporan dilaksanakan dengan baik oleh bidangnya masing-masing, dan juga pelaporan dilakukan setiap adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan serta merekamemiliki tanggung jawab setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga padamnya kebakaran tersebut.

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pemantauan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Tindakan Pelaksana	22 (92%)	2 (8%)	-	24 (100%)
2	Pelaporan	23 (96%)	1 (4%)	-	24 (100%)
3	Tanggapan	22 (92%)	2 (8%)	-	24 (100%)
Jumlah		67	5	-	
Rata-Rata		22	2	-	24
Persentase		93%	7%	-	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari hasil tabel V.10 bahwa rata-rata indikator pemantauan berada pada kategori “Terlaksana”. hal ini dikarenakan :

Tindakan pelaksanaan, masyarakat peduli api melaksanakan pencatatan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan manual. Dilihat ddari jawaban reponden masyarkat peduli api (MPA), mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan mereka sudah melaksanakan pencatatan dengan baik dan mereka sudah mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan suatu pekerjaan karena mereka direkrut oleh kepala desa masing-masing.

Pelaporan, dilihat dari jawaban responden Masyarakat Peduli Api(MPA) mereka menjawab terlaksana. hal ini diarenkan bahwa mereka menerima laporan terjadinya kebakaran dari masyarakat sekitar maka dari itu masyarakat peduli api melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tanggapan, yaitu tanggung jawab masyarakat terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari jawaban responden Masyarakat Peduli Api (MPA), mereka menjawab terlaksana. dikarena hal ini bahwa masyarakat peduli api, mempunyai peranan penting atas peristiwa terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mereka mempunyai tanggung jawab saat terjadinya kebakaran.

Kemudian Berdasarkan observasi penelitian dilapangan bahwa untuk indikator pemantauan berada pada kategori “Terlaksana” hal ini dikarenakan Masyarakat Peduli Api (MPA) kurang bertanggung jawab atas penanganan kebakaran hutan dan lahan, kerja dilakukan dalam penanggganan kebakaran

kurang maksimal hal ini dikarenakan anggaran hanya dikasi ketika terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dengan demikian dilihat dari hasil penyebaran kuesioner, dan observasi bahwa indikator pemantuan berada pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan bahwa Masyarakat Peduli Api (MPA) tidak benar-benar kerja dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan mereka tidak sepenuhnya bekerja.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah untuk membantu masing-masing unit kerja organisasi supaya dapat melaksanakan tuganya secara efektif. Pengawasan seharusnya dilakukan unit organisasi yang berdiri bebas dan terdiri dari para profesional yang sanggup memberikan saran keluar pemecahan masalah, baik yang bersifat koreksi maupun pencegahan.

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pengawasan Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CK	KT	
1	Sasaran	13 (77%)	4 (23%)	-	17 (100%)
2	Identifikasi	5 (29%)	10 (59%)	2 (12)	17 (100%)
3	Penilaian	5 (29%)	11 (65%)	1 (6%)	17 (100%)
Jumlah		23	25	3	51
Rata-Rata		8	8	1	17
Persentase		45%	49%	6%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel V.11 dilihat bahwa rata-rata indikator pengawasan berada pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan :

Sasaran, pelaksanaan sasaran strategi yang dilakukan oleh saat ini masih bisa dikatakan kurang terlaksana dikarenakan sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dilihat dari jawaban responden Pegawai BPBD, bahwa mereka menjawab terlaksana. hal ini karena mereka mencari aman untuk strategi yang digunakan saat ini, faktanya yaitu sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Identifikasi, dilihat dari jawaban responden pegawai BPBD mereka menjawab cukup terlaksana. dikarenakan bahwa mereka tidak bisa memastikan bahwa terjadinya kebakaran hutan ini 100% dikarenakan jarak antar pulau dan alat transportasi tidak memadai.

Penilaian, dilihat dari jawaban responden pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa mereka menjawab cukup terlaksana. hal ini dikarenakan menurut mereka pelaksanaan yang dilakukan saat ini belum efektif dilaksanakan sesuai strategi. Karena mereka sudah bekerja lama dalam hal ini, akan tetapi saat ini setiap tahunnya masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, bisa dikatakan strategi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Bapak Nurman, SH) mengenai indikator pemantauan, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam strategi kami dalam melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini pertama dan sebelum kita melaporkan pihak atau daerah yang terjadi kebakaran hutan melaporkan ke kami dan kami akan mempersiapkan

apa istilahnya strateginya dan kita langsung koordinasi denan TNI, POLRI untuk menangani kebakaran hutan dan lahan itu secepatnya, strategi yang dilakukan sesuai dan berjalan.identifikasi seharusnya yang jawab kasi secara umum yang berada dilapangan itu yang tau identifikasi harus dituntaskan secepatnya kalau kami anggota kami kalau malam juga main juga sampai tuntas baru istirahat.selama ini prosedur sudah berjalan dengan lancar mudah-mudahan. Kita bisa menanggapi kebakaran itu secara secepatnya tapi kalau kebakran yang sangat besar-besaran kadang itu terjadi pada tahun 2021 dibulan Februari itu terjadi di rangsang pesisir itu sangat besar tu terjadi dari desa sampai tiga desa dari bungur,Tengayun Raya, sampai Tanjung Kedabu. Jadi kita tangani bersama-sama dengan pihak Desa, disana juga ada posko-posko yang bekerja sama dengan pt dan selama ini kita berkoordinasi dengan pt kalau bisa sebelum terjadi kebakaran kita membuat embung, embung itu suatu kolam yang berisi air. Pada umumnya kebakaran pada musim kemarau dan sekat kanal pada umumnya masyarakat kita airnya langsung kelaut tiada disekat nanti pada saat musim kemarau mencari air susah kita berkoordinasi, kita anggarkan yang jelas pihak ketiga kita kerja sama mengamankan kebakaran hutan dan lahan”. (Wawancara, 2 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa strategi yang dijalankan selama ini berjalan dengan cukup baik, seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki strategi yang baru agar tidak terjadinya kebakaran yang sangat besar saat bulan februari 2021, dan identifikasi tidak bisa dilaukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu sendiri, seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengidentifikasi kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Bapak Ekaliptus, SH) mengenai indikator pengawasan, beliau menjelaskan bahwa :

“Strategi, ketika kita sampai dilokasi kita melaksanakan yaitu mengumpulkan tim Desa, MPA kita brefing terlebih dahulu menentukan kebakarannya disini dan titik airnya disini jaraknya, kita bagi-bagi tugas mengepung api sampai melumpuhkan kepala apinya. Untuk indentifikasi itu bukan wewenang kita. Untuk keefektifan kita sering terlambat karna faktor pulau, sekitar 80% keefektifannya kerja” .(Wawancara, 2 juni 2021, Pukul, 11.00 WIB)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan briefing sebelum memadamkan api dan membagi tugas per tim, untuk identifikasi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan keefektifan pelaksanaan kerja hanya 80% faktor jarak tempuh dan pulau.

Berdasarkan observasi peneliti bahwa untuk indikator pengawasan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. hal ini dikarenakan bahwa mereka tidak bisa mengidentifikasi atau penyebab kebakaran tersebut, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, strategi yang dijalankan belum efektif bekerja masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya berdasarkan observasi penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bekerja masih banyak menggunakan alat seadanya dikarenakan keterbatasan alat untuk pemadman kebakaran.

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Indikator Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penagganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Sasaran	17 (71%)	7 (29%)	-	24 (100%)
2	Identifikasi	8 (33%)	11 (46%)	5 (21%)	24 (100%)
3	Penilaian	7 (29%)	13 (54%)	4 (17%)	24 (100%)
Jumlah		32	31	9	72
Rata-Rata		11	10	3	24
Persentase		45%	43%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.12 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Masyarakat Peduli Api (MPA) mengenai indikator pengawasan terhadap Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah “Terlaksana”

Sasaran Strategi, dilihat dari jawaban Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) bahwa mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan mereka menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan sesuai arahan dari atasan atau ketua kelompok.

Identifikasi, dilihat dari jawaban responden masyarakat peduli api bahwa responden menjawab kurang terlaksana. hal ini dikarenakan bahwa identifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan tidak dapat ditemukan.

Penilaian, dilihat dari jawaban responden Masyarakat Peduli Api(MPA) mereka menjawab cukup terlaksana. hal ini dikarenakan dari segi keuangan yang kurang saat pemadaman kebakaran.

Berdasarkan observasi penelitian lapangan bahwa untuk indikator penguasaan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. hal ini terlihat bahwa Masyarakat peduli api (MPA) dalam sasaran strategi yang digunakan masih kurang maksimal dalam melaksanakan penanganan kebakaran dikarenakan alat yang tidak memadai. dan identifikasi juga tidak bisa ditemukan dalam kebakaran hutan dan lahan ini padahal identifikasi ini sangat perlu dalam mencari pelaku

kebakaran. Selanjutnya untuk penilaian Masyarakat Peduli Api (MPA) masih kurang dikarenakan faktor keuangan dan usia yang sudah tua.

Dengan demikian dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator pemantauan berada pada kategori “Kurang Terlaksana”, hal ini dikarenakan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal dikarenakan keterbatasan alat dan keuangan yang belum terpenuhi, dan juga sasaran strategi yang belum maksimal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seharusnya Masyarakat Peduli Api (MPA) diberikan kebutuhan yang cukup seperti alat pemadaman yang modern dan pelatihan khusus bagi Masyarakat Peduli Api(MPA) agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.

C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui keseluruhan tanggapan responden Pegawai BPBD dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti maka dilakukan rekapitulasi responden Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten kepulauan meranti.

Rekapitulasi ini berguna untuk membantu penelitian dalam menilai keseluruhan indikator yaitu : Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pengawasan. Apakah implementasi strategi Badan Penanggulanagan Bencana daerah kabupaten

Kepulauan Meranti dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah terlaksana atau kurang terlaksana.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi dibawah ini:

Tabel V.13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dan Honorer Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabapaten Kepulauan Meranti Mengenai Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Pelaksanaan	11 (65%)	2 (12%)	4 (23%)	17 (100%)
2	Pemantauan	13 (76%)	4 (24%)	-	17 (100%)
3	Pengawasan	8 (47%)	8 (47%)	1 (6%)	17 (100%)
Jumlah		32	14	5	51
Rata-rata		11	4	2	17
Persentase		65%	23%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari hasil rekapitulasi yang penulis daatkan dari hassil penyebaran kuesioner pada pegawai dan honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mereka menjawab rata-rata berada pada kategori “Terlaksana”. hal ini diakarenakan:

Indikator pelaksanaan, mereka menjawab terlaksana, mereka ditunjuk oleh atasan dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan juga mereka melakukan kegiatan sesuai Standar Operation Procedure (SOP).

Indikator pemantauan, dari hasil penyebaran kuesioner mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan bahwa mereka menilai sudah melaksanakan tugasnya dengan benar dalam pencatatan kejadian kebakaran dan pelaporan kepada atasan dan pelaporan kepada Provinsi.

Indikator pengawasan, dari hasil penyebaran kuesioner pada pegawai dan honorer BPBD, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan menilai bahwa sasaran strategi yang dilaksanakan selama ini berjalan dengan baik. Padahal strategi yang dilaksanakan masih kurang efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Dari analisis diatas hasil kuesioner yang telah di sebarakan kepada pegawai dan honorer BPBD dan observasi peneliti lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. hal ini dikarenakan strategi yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencan Daerah masih ada terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CK	KT	
1	Pelaksanaan	15 (63%)	9 (37%)	-	24 (100%)
2	Pemantauan	22 (92%)	2 (8%)	-	24 (100%)
3	Pengawasan	11 (46%)	10 (42%)	3 (12%)	24 (100%)
Jumlah		48	7	1	72
Rata-rata		16	7	1	24
Persentase		67%	29%	4%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan bahwa rata-rata jawaban responden Masyarakat Peduli Api (MPA) berada pada kategori “Terlaksana”.

Indikator pelaksanaan, dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada Masyarakat Peduli Api (MPA), mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan masyarakat peduli api mereka diangkat oleh kepala desa masing-masing untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Indikator pemantauan, dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat peduli api (MPA) mereka menjawab terlaksana. hal ini dikarenakan mereka melakukan pencatatan dan pelaporan setiap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Indikator pengawasan, dilihat dari penyebaran kuesioner pada masyarakat peduli api (MPA), mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan mereka

mengikuti intruksi atasan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Padahal strategi yang digunakan belum maksimal mampu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

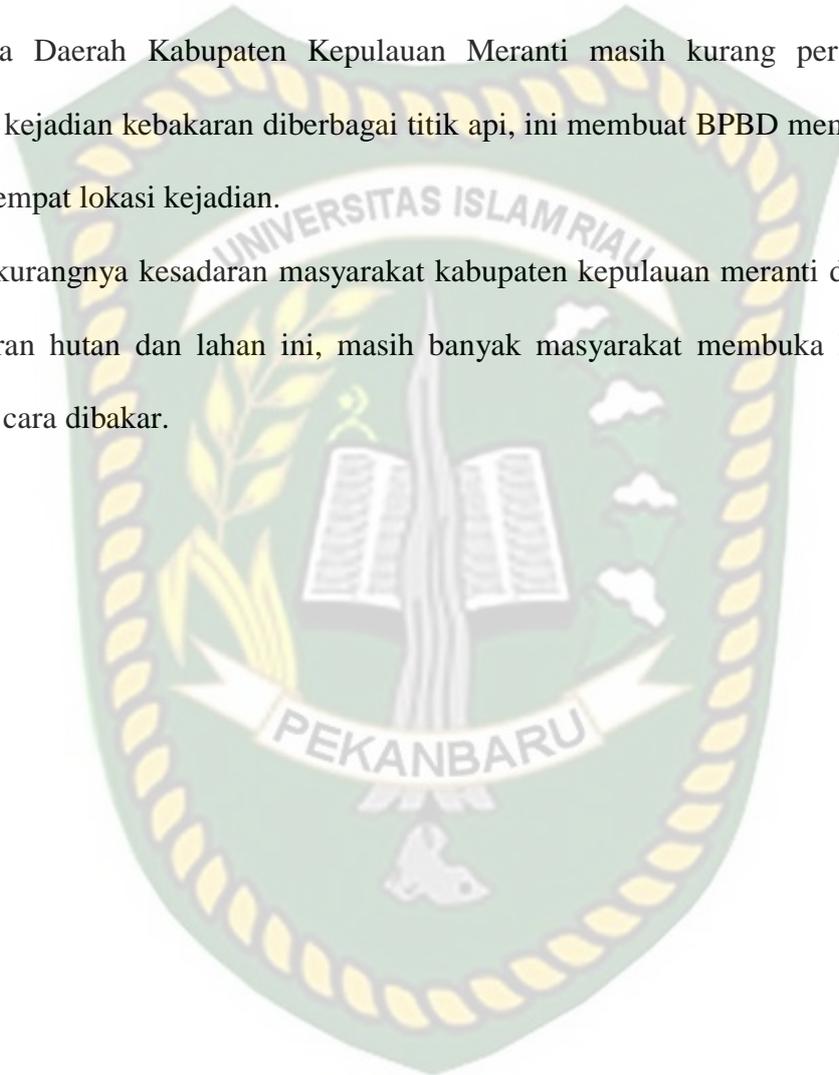
Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan dan penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi Masyarakat Peduli Api (MPA) bahwa Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penaggangan Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu “Cukup Terlaksana”. hal ini dikarenakan masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Hambatan Dalam Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Dari hasil penelitian yang dilakukan yang berhubungan dengan Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan ditemukan beberapa hambatan, antara lain:

1. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan tidak adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada BPBD.
2. Terbatasnya alat pemadaman kebakaran, dikarenakan alat yang dimiliki saat ini sangat minim apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di banyak titik lokasi kebakaran.

3. Faktor penghambat lainnya yaitu jarak atau lokasi kebakaran yang sangat jauh, dan akses jalan yang begitu sulit untuk dilalui, jarak dipisahkan oleh lautan dan pulau menjadi memperlambat kedatangan tim ke lokasi kejadian.
4. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang personil, apabila kejadian kebakaran diberbagai titik api, ini membuat BPBD membagi tim ketempat lokasi kejadian.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat kabupaten kepulauan meranti dalam kebakaran hutan dan lahan ini, masih banyak masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan lahan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Indikator pelaksanaan berada pada kategori cukup terlaksana, hal ini dikarenakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memberika anggaran kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), padahal didalam strategi BPBD terdapat Pemerintah memprioritaskan kepada Badan Penanggualangan Bencana Daerah (BPBD) untuk keperluan bencana, ini membuat keterbatasan BPBD dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
2. Indikator Pemantauan berada pada kategori terlaksana. hal ini dikarenakan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pencatatan, pelaporan dan tanggung jawab mereka menjalankan tugas mereka dengan baik.
3. Indikator pengawasan berada pada kategori cukup terlaksana. hal ini dikarenakan strategi yang dilaksanakan saat ini belum efektif masih banyak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di beberapa kecamatan yang rawan kebakaran.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai Implementasi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti agar menambah jumlah alat pemadaman kebakaran yang sesuai dibutuhkan apabila terjadi kebakaran diberbagai lokasi kejadian.
2. Untuk Badan Penanggualangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, agar menambah jumlah sumber daya manusia, yang bertujuan untk meningkatkan kualitas pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3. Untuk Masyarakat Peduli Api (MPA), diharapkan dapat bertanggung jawab atas penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan kesepakatan.
4. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten kepulauan meranti harus meningkatkan kekuatan sumber daya manusia dan kekuatan dari kelembagaan lain untuk bekerja sama seperti pihak TNI, Polri dan pihak swasta untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus benar-benar berupaya sebaik mungkin untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan dari pemerintah pusat, agar anggaran tersebut bisa dianggarkan untuk keperluan peralatan pemadaman kebakaran, bahwa anggaran ini memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R. 2017. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2017. *Manajemen Strategis*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE
- Hanim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi dan manajemen*. Pekanbaru. UIR Press
- Hasibuan. Malayu S.P. 2016. *Manajemen Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hunger dan Wheelen. 2017. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional
- Indradi, Syamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publiishing
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Pasalog, H. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Strategi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Siagian, P. Sondang. 2019. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi
- Siagian, P. Sondang. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinambela, L.P. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*". Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :

Alfabeta

Sule dan Sefullah, 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana

Sule,E.T,. & Saefullah,K.(2010). *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana

Syafiie,I.K.2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syafri, Wirman.2012. *Studi Tentang Adminitasi Publik*. Jatinangor: Erlangga

Taufiqurrohman. 2016. *Manajemen Stratejik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Usman, Husaini.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi Aksara

Zulkifli dan Numasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Zulkifli dan Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru.: Marpoyan Tujuh Publishing

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*.Fispol Uir Pekanbaru

Dokumentasi dan Rujukan

JURNAL

Rossa Yuliana Putri (2017). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Muhammad Ichsan Kabullah (2020). Aliensi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Undang-Undang Serta Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tentang Bencana Alam

Peraturan Gubernur RIAU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

DOKUMEN LAINNYA

Renstra (Rencana Strategis) BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021,